



info indonesia

● TABLOID REFERENSI PEMILU 2024 ●

MINGGU II FEBRUARI 2024

HARGA @Rp 20.000,-



Election 2024



MENANG HITUNG CEPAT!

SIREKAP
SALAH INPUT
KPU KENA
SEMPROT

PEMILIH
PKS
PALING
LOYAL

PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN
AKAR MASALAH
SULBAR

KEMENANGAN
PRABOWO GIBRAN
UNTUK SELURUH
RAKYAT INDONESIA

ANIES
TETAP DI
JALAN
PERUBAHAN

PDIP
BERANI
JADI
OPOSISI



Oposisi

Hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024 menempatkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang sekaligus mampu mencapai target yakni berhasil dalam satu putaran. Kemenangan hitung cepat itu disambut suka cita seluruh pendukung Prabowo-Gibran di seluruh Indonesia.

Namun perlu diingat, itu adalah hasil quick count versi lembaga survei. Sementara real count dari KPU masih dalam proses. Artinya, semua ini masih bisa terjadi perubahan. Kemungkinan yang diinginkan pendukung 01 dan 02 adalah dua putaran.

Untuk dua putaran juga mulai tergambar pasangan mana yang akan maju, yakni kemungkinan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo-Gibran. Sementara, meski kecil peluang Ganjar Pranowo-Mahfud MD tetap ada.

Namun yang kita bahas bukan satu atau dua putaran, tapi mengamati bagaimana sikap partai pendukung dan pengusung selanjutnya. Beranikah mereka meninggalkan empuknya kursi kekuasaan yang dibagikan Presiden Jokowi dan menjadi oposisi.

Atau sebaliknya, kembali ikut bergabung dengan kekuasaan atas nama persatuan Indonesia, karena sesungguhnya mereka juga tidak kuat menanggung status oposisi. Konsistensi sikap partai politik ini patut dicermati karena akan menjadi gambaran peta demokrasi Indonesia kedepannya.

Presiden Joko Widodo berhasil merangkul semua partai politik kecuali PKS untuk mengawal pembangunan yang telah digagasnya. Dalam perjalanannya, hampir tidak ada pertentangan di parlemen terhadap semua gagasan Jokowi.

Parlemen seperti terlihat satu suara ketika bicara soal Ibu Kota Negara (IKN) atau soal anggaran infrastruktur dan lainnya. Demikian juga soal kenaikan BBM, hampir tidak ada drama pertentangan.

Kritikan-kritikan malah hadir di ruang publik, di jalanan maupun kalangan akademisi. Namun, kritikan rakyat itu dianggap sebagai pertentangan terhadap pemerintah tanpa ada satupun partai yang peduli.

Tidak ada lagi ruang oposisi bagi publik untuk menyuarakan kritiknya. Sementara, partai politik juga lebih mementingkan ketua umum mereka sebagai bentuk sebuah kepatuhan daripada membela kritikan rakyat.

Di Pemilu 2024 ini kita berharap ada partai-partai yang berani bersikap dan mengambil jalur oposisi seperti yang dilakukan PDIP pada masa lalu. Publik juga berharap ada banyak partai yang berani mengambil sikap oposisi karena ini akan menjadikan iklim politik yang baik bagi demokrasi Indonesia.

Tinggal bagaimana sikap para elit politik. Sungguh terasa berat memang meninggalkan semua kemewahan dan memilih kembali ke jalan untuk menjadi penyeimbang pemerintah.

Ini sebuah tantangan bagi elit politik. Mereka yang tak kuat meninggalkan kemewahan pasti akan ikut bergabung dengan partai pemenang.

Harapan publik tentu ingin hadir partai oposisi yang kuat agar mampu mengimbangi pemerintah. Bukan hal yang tabu atau ditakutkan karena dengan demikian pemerintah akan berjalan baik serta mendapat pengawasan yang ketat dan melekat dari oposisi.

Sekarang kita tinggal menunggu partai mana saja yang berani mengambil sikap itu. Selamat membaca!!!





“Quick count yang sekarang beredar dari berbagai lembaga survei bukan merupakan data valid menurut hukum yang bisa jadi pegangan”

Hamdan Zoelva

ANIES TETAP DI JALAN PERUBAHAN

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menempati posisi kedua hasil hitung cepat Pilpres 2024 dengan perolehan suara di kisaran 22-27 persen dari beragam lembaga survei. Pasangan ber-juluk AMIN ini unggul atas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di posisi paling buncit.

Meski seluruh lembaga survei menempatkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024, Anies meminta publik untuk tak terburu-buru mengambil kesimpulan. “Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya serba cepat, sekarang harus disimpulkan sekarang, kasih waktu bagi KPU untuk bekerja, jangan kita tergiring untuk segalanya cepat, kita tunggu sampai KPU tuntas,” kata Anies di Markas Pemenangan Timnas AMIN, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024.

Anies mengatakan, hasil yang dipertontonkan oleh quick count terlalu awal dan meminta semua pihak menunggu sampai semuanya rampung.

“Kita lihat dulu sampai selesai semuanya. Kita tunggu jangan buru-buru, jangan buru-buru menyimpulkan kita hormati proses, kita hormati proses di KPU,” ungkapnya.

Namun, Anies mengatakan pihaknya akan menghormati hasil yang ada karena menurutnya hasil tersebut menunjukkan keinginan dari rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati, kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat karena itu adalah kemauan rakyat. Kita harus menghormati kemauan rakyat, kita harus menghargai keputusan rakyat. Ini komitmen kita,” ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies juga berbicara soal slogan perubahan yang selama ini ia gunakan selama berkampanye. Menurutnya, gerakan perubahan tersebut telah membawa nuansa baru dalam kampanyenya. Namun, gerakan tersebut berkembang menjadi misi yang lebih besar. Ia berharap, perubahan ini dapat membuat demokrasi semakin menjunjung tinggi adab dan etika.

“Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya. Serba swa, swakarsa, swadana, swakarya. Ini mewarnai betul,” terang Anies.

Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menegaskan akan tetap me-

neruskan gerakan perubahan ini di berbagai sektor untuk menjaga demokrasi dan membersihkan ketimpangan yang ada di Indonesia.

“Saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikit pun,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengingatkan agar para pendukung AMIN, termasuk para kader PKB dan partai pendukung hingga simpatisan, untuk tidak terpengaruh hasil hitung cepat tersebut hingga keluar pengumuman resmi dari KPU.

“Kepada seluruh para pendukung AMIN, juga para kader simpatisan, para penggerak perubahan di manapun anda berada, saya minta jangan terhipnotis oleh hasil quick count. Jangan terhipnotis oleh hasil quick count,” kata Ketum PKB itu.

Cak Imin mencurigai angka quick count itu lantaran hasilnya tidak beda jauh dengan hasil survei.

“Quick count itu juga survei sebenarnya, karena itu sampling. Sampling dari apa yang coba diambil dari TPS-TPS. Jadi tidak sensus. Pemilu itu kan sensus, 1 orang 1 suara, jumlah daftar pemilih tetap, jumlah yang nyoblos dikalkulasi kemudian jumlah suara,” katanya.

Cak Imin juga meminta agar semua pendukung AMIN terus mengawal hasil perolehan suara Pilpres 2024. “Waktu kita masih sangat panjang, apalagi tadi sore kita mendengar sistem rekapitulasi online KPU down. Harus cepat-cepat memiliki rekapitulasi manual yang betul-betul terjaga dengan baik,” katanya.

Wakil Ketua DPR itu juga menekankan agar semua kader PKB berjuang mengawal dan menjaga perolehan suara PKB dan AMIN. Hal ini untuk menghitung suara untuk perolehan kursi-kursi di DPR.

“Amankan kursi-kursi PKB, amankan perolehan PKB dan amankan perolehan AMIN untuk kader PKB,” katanya.

Cak Imin juga menyinggung kepada para pendukung dan relawannya untuk tidak terprovokasi seandainya aksi sujud syukur salah satu paslon pada Pemilu 2019.

“J a n g a n

lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan, sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur,” ujar Muhaimin.

Ketua Umum PKB itu mengatakan bahwa dirinya bersama Anies Baswedan akan tetap konsisten menjaga mandat para pendukungnya. Ia pun meminta kepada para pendukung AMIN untuk tetap mengawal suara hingga akhir penghitungan resmi di KPU.

“Kepercayaan seluruh warga bangsa atas pilihannya kepada AMIN adalah kepercayaan yang menjadi mandat perjuangan kita semua, dan tentu harus kita jaga karena itu saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan, jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sampai di akhir penghitungan yang tepat melalui KPU,” tegas Cak Imin.

Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin, Sudirman Said, menilai, hasil quick count masih bersifat prediksi dan bukan bersifat konstitusional.

“Karena semuanya masih berupa prediksi bukan merupakan hasil-hasil yang secara konstitusional memang yang sudah konkret,” kata Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kamis 15 Februari 2024.

Sudirman menilai amat terlalu dini jika menjadikan hasil quick count sebagai alat untuk menyimpulkan elektoral. Maka dari itu, pihaknya masih menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU.

Lebih lanjut, eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menyinggung film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap kecurangan pemilu. Menurutnya, film tersebut hanya membagikan sebagian kecil dari situasi yang saat ini tengah terjadi.

“Ya itu dokumenter, bukan fitnah bukan apa tapi, rekaman fakta dan fakta yang diulas atau ditata dengan sangat baik, dari segi seni maupun substansi. Tapi kita mengalaminya dan hari-hari kita sedang ditambahkan ditambah bukti-bukti bahwa pemilu kita memang banyak masalah yang harus dibereskan,” ujarnya.

Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zoelva, mengingatkan, hasil hitung cepat bukanlah data valid untuk menentukan hasil Pilpres 2024. KPU diharapkan tidak menjadikan quick count sebagai basis dalam perhitungan riil (real count) dengan memanipulasi sistem pada Pilpres 2024.

“Kami melihat indikasi, jangan sampai bahwa quick count nanti menjadi patokan dalam mengisi, dalam rangka rekapitulasi manual,” kata Hamdan dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024.

“Oleh sebab itu, kami minta betul-betul menjaga, jangan sampai quick count bisa jadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan pengubahan-pengubahan (data) dalam rekapitulasi manual (oleh KPU),” kata Hamdan.

Hamdan menuturkan, data yang paling valid menurut hukum untuk menjadi pegangan dalam menetapkan perolehan suara tiap paslon adalah hasil penghitungan riil yang sedang berproses di KPU. Adapun proses real count di KPU saat ini masih berjalan.

“Quick count yang sekarang beredar dari berbagai lembaga survei bukan merupakan data valid menurut hukum yang bisa jadi pegangan. Karena itu, terlalu dini kita menyimpulkan bahwa suara paslon tertentu mencapai angka sekian yang pasti sampai merayakannya (kemungkinan). Kita harus hormati proses rekapitulasi yang dilakukan KPU secara berjenjang,” ujar Hamdan.

Timnas Amin pun meminta kepada seluruh saksi dan relawan di seluruh wilayah Indonesia untuk terus mengawal proses rekapitulasi suara Pilpres 2024. ●RDO



“Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo-Gibran dan seluruh tim kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan”



Prabowo Subianto

KEMENANGAN PRABOWO-GIBRAN UNTUK SELURUH RAKYAT INDONESIA

Hasil hitung cepat Pilpres 2024 mengempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul atas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Meski belum secara resmi dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), paslon nomor urut 02 ini sudah menyampaikan pidato kemenangan di depan pendukungnya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam, 14 Februari 2024.

Prabowo bersyukur hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menyatakan dirinya dan Gibran unggul dari dua rivalnya pada Pilpres 2024.

“Atas nama tim Prabowo-Gibran, atas nama Koalisi Indonesia Maju, kita bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, dari semua hitung cepat lembaga survei, termasuk lembaga yang berada di pihak rivalnya, menyatakan bahwa dirinya dan Gibran mencapai perolehan suara yang bisa menembus kemenangan satu putaran.

“Semua penghitungan cepat lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak pasangan calon lain, menunjukkan angka-angka yang memang pasangan Prabowo-Gibran menang sekali putaran,” katanya.

Kendati begitu, Prabowo mengingatkan para pendukungnya untuk tidak euforia berlebihan. Ia mengajak pendukungnya tidak jumawa dan tetap rendah hati atas hasil hitung cepat tersebut.

“Saya bersama Mas Gibran berpesan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia, kita tetap rendah hati.”

rendah hati,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta masyarakat dan pendukungnya tetap menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan KPU.

“Saudara saudara sekalian, kita harus tetap tunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik,” tegasnya.

Menteri Pertahanan ini juga mengatakan, kemenangannya harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga ia berjanji akan merangkul semua unsur dan kekuatan.

“Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo-Gibran dan seluruh tim kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan,” ujar Prabowo.

Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan menjadi pemimpin yang mengayomi masyarakat, dan akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

“Apapun sukunya, apa pun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apa pun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga,” ucap Prabowo.

Selain itu, Prabowo akan membentuk mahligai pemerintahan yang diisi insan terbaik bangsa. “Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra putri terbaik bangsa Indonesia,” tuturnya.

Prabowo juga mengajak masyarakat untuk ber-

satu kembali karena masa kampanye Pemilu 2024 telah selesai. “Kita laksanakan kampanye me-

mang dengan semangat, memang kadang dengan kata-kata keras, itu namanya kampanye. Sekarang kampanye telah selesai, kita harus bersatu kembali,” kata Prabowo.

Prabowo mengajak masyarakat untuk melupakan hal-hal yang bisa memecah belah persaudaraan.

“Saya mengajak mari kita lupakan kata-kata yang kasar di antara saudara. Bertengkar itu biasa, tapi bertengkar jangan menjadi perpecahan yang lama-lama,” katanya.

Menurut Prabowo, Indonesia merupakan negara yang memiliki tradisi untuk senantiasa mencari persaudaraan. “Di seluruh tempat yang kami datangi, rakyat selalu mengatakan ingin kerukunan di antara pemimpin-pemimpinnya, rakyat ingin kesejahteraan,” tutur dia.

Dia pun mengutip falsafah sosial budaya Jawa, mikul dhuwur mendhem jero, yang secara umum berarti mengangkat hal baik dan memendam hal yang kurang baik. “Ini adat, budaya kita, rakyat Indonesia tidak suka saling menjelek-jelekkan,” ucapnya.

Prabowo juga mengaku tak peduli terhadap berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada paslon nomor urut 02. Dia menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat Indonesia yang memilih presiden dan wakil presiden untuk periode 2024–2029.

“Bagi saya gak ada masalah (tuduhan curang). Saya yang penting rakyat. Saya gak peduli. Saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut? Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya membela kebenaran. Saya hanya mau membela rakyat,” kata Prabowo.

Dia juga menilai berbagai tuduhan kecurangan itu merupakan bagian dari risiko perjalanan

sejarah. “Demikianlah risikonya dalam sejarah, pergantian pimpinan di setiap tempat mengandung ada yang berhasil dan tidak berhasil. Kedua, negara sebesar dan sekaya, sepenting kita pasti banyak yang melirik. Janganlah kita masuk perangkap suatu permainan besar ini. Selalu, dalam sejarah kalau tidak bisa

bunuh orangnya, bunuh karakternya,” kata Prabowo.

Baginya, Pemilu 2024 bukan sebatas persaingan, melainkan ada tujuan yang lebih besar.

“Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil yang diinginkan dan selalu saya kira kita harus kedepankan kepentingan besar, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita,” kata dia.

Prabowo latas memuji kinerja KPU karena dinilai sukses dalam menyelenggarakan pemilu tahun ini. “Saya ingin menyampaikan terima yang sebesar besarnya kepada KPU yang telah menyelenggarakan pemilihan umum terbesar di dunia dengan keadaan lancar dan sukses,” ujarnya.

Menurut Prabowo, keberhasilan itu terasa dari suasana pencoblosan yang dinilai aman. Dia menilai tidak ada kekusruhan yang terjadi di beberapa daerah saat proses pencoblosan berlangsung. Selain itu, dia juga menilai logistik pemilu telah disebar dengan baik, sehingga warga di pelosok bisa melakukan prosesi pencoblosan.

Tidak hanya untuk KPU, dia juga memuji Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dianggap sukses mengawasi proses pemilu.

“Seluruh jajarannya dan seluruh tingkatan termasuk Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah menyelenggarakan pemilihan umum,” kata dia.

Melanjutkan pidato Prabowo, Gibran mengaku sering diremehkan dan dianggap bukan siapa-siapa sebelum kampanye bergulir. “Tiga bulan lalu saya bukan siapa-siapa, saya masih dikatai plonga plongo, Samsul, dikatai takut debat,” kata Gibran.

Komentar pedas itu diakui Gibran kerap diterimanya, bahkan ketika masuk ke massa kampanye. Meski demikian, berkat bantuan Prabowo dan seluruh massa pendukung serta sukarelawan, Gibran mengaku bisa melewati semuanya. Bahkan, Gibran mengaku bisa mendapatkan suara dengan jumlah banyak berkat dukungan sukarelawan yang sudah berjuang di lapangan.

Gibran berterima kasih kepada sukarelawan yang telah memberikan dukungan hingga sejauh ini. Ia berharap harapan sukarelawan kepadanya bisa terpenuhi ketika telah resmi memimpin Indonesia.

Gibran juga menyebut mayoritas pemilih yang membuat perolehan suaranya unggul dari pasangan calon lain berasal dari kalangan anak muda.

“Ini angka tinggi karena anak-anak muda semua, anak-anak muda yang ingin jadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas,” kata Gibran.

Menurut Gibran, banyak anak muda yang tertarik untuk mendukung karena merasa terwakili oleh kehadirannya sebagai calon wakil presiden. Dengan demikian, Gibran mengaku bisa berperan sebagai perpanjangan tangan anak muda untuk berkontribusi dalam membangun bangsa. ●RDO





"Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik"

Hasto Kristiyanto

ANOMALI SUARA GANJAR DAN PDIP

**Ganjar Pranowo menyoro-
ti anomali hasil suara
dirinya dan Mahfud MD
dengan PDIP berdasarkan versi
jumlah hitung cepat atau
quick count. Ganjar bersama
TPN Ganjar-Mahfud menyelidiki
anomali tersebut.**

"**H**asil dari quick count, perolehan PDIP saya kira masih tinggi ya. Kalau nggak salah masih nomor satu ya," kata Ganjar di gedung High End, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.

Anomali yang dimaksud dalam hal ini adalah suara Ganjar-Mahfud terbawah dibanding dengan pasangan calon lainnya. Sementara itu, PDIP berada di posisi teratas dibanding partai lain hasil Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, Ganjar menyoro-
ti anomali suara dirinya dengan perolehan suara PDIP berdasarkan quick count. Ganjar mengatakan tim pendukungnya akan menyelidiki anomali tersebut.

"Agak anomali dengan suara saya, maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya, sepertinya split ticket-nya agak terlalu lebar," imbuhnya.

Ganjar menambahkan, TPN Ganjar-Mahfud akan menunggu keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilu 2024. Setelah itu, TPN baru menentukan langkah selanjutnya.

"Kami sudah sepakat akan menunggu keputusan KPU. Sesuai apa yang disampaikan KPU sambil teman-teman bekerja," ucapnya.

Menurut dia, banyak temuan dan laporan di lapangan terkait proses Pemilu 2024, yang mencakup evaluasi dari sudut pandang struktural partai dan sukarelawan. Selain itu, TPN juga akan mengonfirmasi informasi dari daerah untuk memastikan tingkat keakuratan data dan menentukan apakah ada pola atau kejanggalan tertentu pada hasil penghitungan suara.

"Makanya kami bahas, kami catat, kami konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah pelanggaran ini terstruktur, sistematis, dan masif. Ini sifatnya laporan, tetapi sekali lagi, prinsip kami, kami akan menunggu keputusan KPU. Apa pun yang diputuskan KPU, kami akan ikuti.

Kami menghormati proses kok," kata Ganjar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan, dalam rapat tertutup pada 15 Februari 2024 dipaparkan laporan terhadap potret dan dinamika pilpres. Dari temuan itu, kemudian dikerucutkan dalam beberapa hal.

Pertama, pilpres tidak ditentukan oleh hasil quick count, tetapi melalui proses rekapitulasi secara berjenjang, dari tempat pemungutan suara (TPS), lalu bertingkat ke atas. Untuk itu, seluruh saksi dari paslon Ganjar-Mahfud terus mengawal proses rekapitulasi tersebut karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

Kedua, disampaikan berbagai temuan, baik yang disampaikan melalui para aktivis serta para pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu. Rekayasa pemilu tersebut disebut dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir.

Ketiga, dikaji juga sejumlah pelanggaran dalam pemilu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemilu. Misalnya, keterlibatan dari pejabat negara yang bertentangan dengan UU Pemilu.

Kemudian, ada berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparaturnya, serta

politik anggaran yang secara nyata dipraktikkan untuk mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya itu, berdasarkan analisis terhadap proses pemilu, ada pelemahan secara sistematis terhadap internal penyelenggara pemilu dan juga pengawas pemilu.

"Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik," ujar Hasto.

Tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar-pakar hukum, pakar teknologi informasi, dan mereka yang punya pengalaman dalam mengungkap bukti-bukti pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan begitu, bukti-bukti pelanggaran tersebut nantinya sesuai dengan ketentuan untuk diajukan ke jalur hukum.

"Terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan. Lalu, sistematis berkaitan dengan orkestrasi yang menyeluruh dan dampaknya adalah masif," ucap Hasto.

Tim khusus ini segera dibentuk. Nama-nama juga sudah dikumpulkan, terdiri dari orang-orang yang punya kredibilitas tinggi dan juga punya spirit dalam menjaga marwah demokrasi.

"Demokrasi yang ada etika politik, demokrasi yang tidak menghalalkan segala cara," katanya.

Tim nantinya akan mengumpulkan seluruh fakta serta persoalan terkait legitimasi pemilu. Bersamaan dengan itu, tim juga menunggu hasil gugatan atas pencalonan Gibran oleh KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Nah, sehingga ke semuanya itu dicermati dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari pilpres ini," ucap Hasto.

Hasto menyebut, berdasar laporan yang ia terima, tim pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga merasakan hal yang sama. Namun, baik tim Ganjar-Mahfud maupun tim Anies-Muhaimin akan bekerja dengan independensinya masing-masing untuk mengugat hasil Pilpres 2024.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, memastikan persoalan yang ditemukan tim khusus akan diajukan sebagai bahan gugatan ke

Mahkamah Konstitusi (MK). "Sudah pasti (menggugat ke MK), kalau lihat begini, sudah pasti," katanya.

Tindakan hukum perlu diambil karena ini merupakan negara hukum. "Kalau mereka merasa kuat mengatur hukum, ya, silakan. Nanti, kan, rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai 'oh, ini hukumnya sudah enggak benar' begitu," ucapnya.

Dari jalur hukum ini, diharapkan akan dapat dipastikan sejauh mana legitimasi Pilpres 2024. Menurut dia, biarlah nanti hukum yang menentukannya. Yang jelas, ia melihat ada banyak aturan dalam perundang-undang yang dilanggar dalam proses Pilpres 2024.

"Kalau pelanggaran UU, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya, mengerti? Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar," tegas Oesman.

Dia juga menyoro-
ti soal kecurangan di TPS. Seharusnya, maksimum jumlah suara di semua TPS adalah 300 suara. Namun, dari temuan TPN, justru ada paslon yang mendapatkan suara lebih dari 700 suara.

"Kok ada laporan seolah-olah paslon mendapatkan 700 sampai 800 suara. Ini gila udah, ini pemilu gila ini," katanya.

Dia tidak ingin rakyat dibohongi dengan hasil pemilu sekarang. Untuk itu, tim khusus Ganjar-Mahfud akan bergerak dan mengungkap kecurangan-kecurangan itu sehingga mata rakyat juga semakin terbuka. Diharapkan pula, rakyat berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran kebenaran.

"Jadi, kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran, kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti," ujar Oesman.

•RDO





HASIL QUICK COUNT PILPRES 2024 GANJAR PRANOWO-MAHFUD MD Per 16 Februari 2024

KEDAIKOPI

(SUARA MASUK 99,3 PERSEN)

ACEH	2,01
BALI	46,7
BANTEN	8,84
BENGKULU	12,8
DIY	33,19
DKI JAKARTA	18,47
GORONTALO	2,87
JAMBI	9,37
JAWA BARAT	9,32
JAWA TENGAH	34,76
JAWA TIMUR	17,33
KALIMANTAN BARAT	13,35
KALIMANTAN SELATAN	6,53
KALIMANTAN TENGAH	9,23
KALIMANTAN TIMUR	10,19
KALIMANTAN UTARA	17,55
BANGKA BELITUNG	18,83
KEPRI	15,45
LAMPUNG	10,89
MALUKU	14,39
MALUKU UTARA	4,46
NTB	9,57
NTT	31,33
PAPUA	38,3
PAPUA BARAT	24,78
PAPUA BARAT DAYA	33,56
PAPUA PEGUNUNGAN	25,38
PAPUA SELATAN	24,94
PAPUA TENGAH	19,4
RIAU	9,41
SULAWESI BARAT	3,77
SULAWESI SELATAN	3,4
SULAWESI TENGAH	7,36
SULAWESI TENGGARA	4,46
SULAWESI UTARA	10,7
SUMATERA BARAT	3,25
SUMATERA SELATAN	11,15

SUMATERA UTARA 11,76

CHARTA POLITIKA

(KAMIS, 15 FEBRUARI 2024

PUKUL 14.22 WIB)

ACEH	2,16
BALI	39,36
BANTEN	11,28
BENGKULU	11,34
DIY	28,58
DKI JAKARTA	16,50
GORONTALO	9,24
JAMBI	11,01
JAWA BARAT	10,88
JAWA TENGAH	34,19
JAWA TIMUR	18,36
KALIMANTAN BARAT	19,46
KALIMANTAN SELATAN	19,46
KALIMANTAN TENGAH	10,89
KALIMANTAN TIMUR	10,99
KALIMANTAN UTARA	9,92
BANGKA BELITUNG	14,48
KEPRI	13,15
LAMPUNG	14,10
MALUKU	15,11
MALUKU UTARA	13,83
NTB	7,40
NTT	25,92
PAPUA	14,72
PAPUA BARAT	10,31
PAPUA BARAT DAYA	31,45
PAPUA PEGUNUNGAN	13,26
PAPUA SELATAN	23,48
PAPUA TENGAH	28,89
RIAU	28,89
SULAWESI BARAT	11,33
SULAWESI SELATAN	5,76
SULAWESI TENGAH	6,55
SULAWESI TENGGARA	6,18

SULAWESI UTARA 15,18

SUMATERA BARAT 4,95

SUMATERA SELATAN 10,50

SUMATERA UTARA 12,11

INDIKATOR

SUMATERA	10,70
BANTEN	9,37
DKI JAKARTA	16,32
JAWA BARAT	10,10
JAWA TENGAH-DIY	33,68
JAWA TIMUR	17,69
BALI-NUSA	27,71
KALIMANTAN	10,92
SULAWESI	7,86
MALUKU-PAPUA	25,01

LSI

SUMATERA	11,70
BANTEN-DKI JAKARTA	13,76
JAWA BARAT	10,68
JAWA TENGAH-DIY	33,19
JAWA TIMUR	17,59
BALI-NUSA	25,47
KALIMANTAN	11,78
SULAWESI	7,64
MALUKU-PAPUA	34,68

LSI DENNY JA

SUMATERA	10,95
BANTEN	9,82
DKI JAKARTA	17,31
JAWA BARAT	10,06
JAWA TENGAH-DIY	34,93
JAWA TIMUR	17,57
BALI-NUSA	26,51
KALIMANTAN	11,19
SULAWESI	8,84
MALUKU-PAPUA	22,48



HASIL QUICK COUNT PILPRES 2024 PRABOWO SUBIANTO-GIBRAN RAKABUMING RAKA Per 16 Februari 2024

KEDAIKOPI

(SUARA MASUK 99,3 PERSEN)

ACEH	19,68
BALI	48,67
BANTEN	55,97
BENGKULU	72,89
DIY	51,18
DKI JAKARTA	40,76
GORONTALO	67,19
JAMBI	63,55
JAWA BARAT	60,48
JAWA TENGAH	53,47
JAWA TIMUR	66,18
KALIMANTAN BARAT	60,99
KALIMANTAN SELATAN	55,18
KALIMANTAN TENGAH	75,13
KALIMANTAN TIMUR	73,32
KALIMANTAN UTARA	80,81
BANGKA BELITUNG	59,44
KEPRI	55,84
LAMPUNG	70,96
MALUKU	66,32
MALUKU UTARA	59,24
NTB	66,05
NTT	66,13
PAPUA	52,8
PAPUA BARAT	66,3
PAPUA BARAT DAYA	59,68
PAPUA PEGUNUNGAN	60,52
PAPUA SELATAN	64,14
PAPUA TENGAH	58,54
RIAU	51,39
SULAWESI BARAT	67,61
SULAWESI SELATAN	39,93
SULAWESI TENGAH	66,68
SULAWESI TENGGARA	76,48
SULAWESI UTARA	78,11
SUMATERA BARAT	36,64
SUMATERA SELATAN	70,41

SUMATERA UTARA 59,87

CHARTA POLITIKA

(KAMIS, 15 FEBRUARI 2024
PUKUL 14.22 WIB)

ACEH	45,78
BALI	55,91
BANTEN	59,86
BENGKULU	67,19
DIY	47,25
DKI JAKARTA	41,62
GORONTALO	63,70
JAMBI	60,51
JAWA BARAT	57,46
JAWA TENGAH	51,16
JAWA TIMUR	63,56
KALIMANTAN BARAT	60,48
KALIMANTAN SELATAN	60,48
KALIMANTAN TENGAH	64,99
KALIMANTAN TIMUR	63,82
KALIMANTAN UTARA	69,25
BANGKA BELITUNG	59,65
KEPRI	52,88
LAMPUNG	67,61
MALUKU	61,91
MALUKU UTARA	64,71
NTB	63,93
NTT	66,18
PAPUA	73,66
PAPUA BARAT	70,10
PAPUA BARAT DAYA	62,15
PAPUA PEGUNUNGAN	76,61
PAPUA SELATAN	64,88
PAPUA TENGAH	61,94
RIAU	46,69
SULAWESI BARAT	53,69
SULAWESI SELATAN	53,69
SULAWESI TENGAH	63,75
SULAWESI TENGGARA	66,79

SULAWESI UTARA 77,18

SUMATERA BARAT 42,63

SUMATERA SELATAN 68,56

SUMATERA UTARA 55,79

INDIKATOR

SUMATERA	55,80
BANTEN	55,87
DKI JAKARTA	41,82
JAWA BARAT	58,70
JAWA TENGAH-DIY	52,93
JAWA TIMUR	64,65
BALI-NUSA	58,51
KALIMANTAN	63,90
SULAWESI	63,99
MALUKU-PAPUA	58,23

LSI

SUMATERA	56,03
BANTEN-DKI JAKARTA	49,87
JAWA BARAT	57,38
JAWA TENGAH-DIY	52,93
JAWA TIMUR	64,29
BALI-NUSA	60,12
KALIMANTAN	61,19
SULAWESI	64,06
MALUKU-PAPUA	49,75

LSI DENNY JA

SUMATERA	57,18
BANTEN	55,92
DKI JAKARTA	41,28
JAWA BARAT	57,91
JAWA TENGAH-DIY	52,07
JAWA TIMUR	65,03
BALI-NUSA	60,20
KALIMANTAN	64,97
SULAWESI	62,65
MALUKU-PAPUA	56,25



HASIL QUICK COUNT PILPRES 2024 ANIES BASWEDAN-MUHAIMIN ISKANDAR

Per 16 Februari 2024

KEDAIKOPI

(SUARA MASUK 99,3 PERSEN)

ACEH	78,31
BALI	4,63
BANTEN	35,2
BENGKULU	14,31
DIY	15,63
DKI JAKARTA	40,77
GORONTALO	29,94
JAMBI	27,08
JAWA BARAT	30,21
JAWA TENGAH	11,76
JAWA TIMUR	16,49
KALIMANTAN BARAT	25,66
KALIMANTAN SELATAN	38,28
KALIMANTAN TENGAH	15,65
KALIMANTAN TIMUR	16,49
KALIMANTAN UTARA	1,64
BANGKA BELITUNG	21,73
KEPRI	28,71
LAMPUNG	18,14
MALUKU	19,29
MALUKU UTARA	36,3
NTB	24,38
NTT	2,54
PAPUA	8,89
PAPUA BARAT	8,91
PAPUA BARAT DAYA	6,77
PAPUA PEGUNUNGAN	14,1
PAPUA SELATAN	10,91
PAPUA TENGAH	22,06
RIAU	39,2
SULAWESI BARAT	28,62
SULAWESI SELATAN	39,93
SULAWESI TENGAH	25,95
SULAWESI TENGGARA	19,07
SULAWESI UTARA	11,2
SUMATERA BARAT	60,1
SUMATERA SELATAN	18,45

SUMATERA UTARA 28,37

CHARTA POLITIKA

(KAMIS, 15 FEBRUARI 2024 PUKUL 14.22 WIB)

ACEH	52,06
BALI	4,74
BANTEN	28,86
BENGKULU	21,47
DIY	24,16
DKI JAKARTA	41,88
GORONTALO	27,06
JAMBI	28,48
JAWA BARAT	31,65
JAWA TENGAH	14,66
JAWA TIMUR	18,07
KALIMANTAN BARAT	20,06
KALIMANTAN SELATAN	38,57
KALIMANTAN TENGAH	24,12
KALIMANTAN TIMUR	25,19
KALIMANTAN UTARA	20,83
BANGKA BELITUNG	25,86
KEPRI	33,97
LAMPUNG	18,29
MALUKU	22,98
MALUKU UTARA	21,47
NTB	28,67
NTT	7,90
PAPUA	11,62
PAPUA BARAT	19,59
PAPUA BARAT DAYA	6,41
PAPUA PEGUNUNGAN	10,13
PAPUA SELATAN	11,65
PAPUA TENGAH	9,17
RIAU	42,35
SULAWESI BARAT	40,55
SULAWESI SELATAN	40,55
SULAWESI TENGAH	40,55
SULAWESI TENGGARA	27,03

SULAWESI UTARA	7,64
SUMATERA BARAT	52,42
SUMATERA SELATAN	20,94
SUMATERA UTARA	32,10

INDIKATOR

SUMATERA	33,50
BANTEN	34,75
DKI JAKARTA	41,86
JAWA BARAT	31,20
JAWA TENGAH-DIY	13,39
JAWA TIMUR	17,67
BALI-NUSA	13,78
KALIMANTAN	25,18
SULAWESI	28,15
MALUKU-PAPUA	16,76

LSI

SUMATERA	32,27
BANTEN-DKI JAKARTA	36,37
JAWA BARAT	31,94
JAWA TENGAH-DIY	13,87
JAWA TIMUR	18,12
BALI-NUSA	14,41
KALIMANTAN	27,03
SULAWESI	28,30
MALUKU-PAPUA	15,57

LSI DENNY JA

SUMATERA	31,87
BANTEN	34,26
DKI JAKARTA	41,42
JAWA BARAT	32,02
JAWA TENGAH-DIY	13,00
JAWA TIMUR	17,40
BALI-NUSA	13,29
KALIMANTAN	23,84
SULAWESI	28,51
MALUKU-PAPUA	21,27



“Hal ini pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden SBY yang sempat mengalami kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan sehingga harus terjadi lobi-lobi politik dahulu”

Ardiyan Saptawan

OPOSISI HARUS LEBIH BERISI

Meski saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan suara namun banyak yang meyakini pasangan Prabowo Subianto - Gibran Raka-buming Raka akan menjadi pemenang di putaran sementara ini. Walaupun banyak yang memprediksi akan berlangsung satu putaran namun peluang menuju sesi kedua masih terbuka lebar.

Di sisi lain jalannya pemerintahan yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Raka-buming Raka diprediksi akan berlangsung lebih berat dibanding masa kekuasaan Joko Widodo karena Partai Gerindra sebagai pengusung tidak sekuat PDIP saat mengusung Jokowi.

Selain itu ada kemungkinan munculnya beberapa partai yang memilih jalur oposisi. Hal ini tentu berdampak lebih baik bagi jalannya demokrasi karena dinamika pemerintahan akan berlangsung keras dan pengawasannya juga lebih kuat.

Dalam pandangan pengamat politik Ardiyan Saptawan, bila memang Prabowo - Gibran akan menang satu putaran bukan berarti pemerintahan yang mereka jalani akan mulus namun sebaliknya akan lebih berat.

Meski Gerindra berhasil mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden namun dari jumlah partai di parlemen mereka masih kalah dari Golkar dan PDIP sehingga akan sulit menguasai parlemen secara mutlak seperti di masa Jokowi.

“Partai Golkar yang di parlemen lebih besar dari Gerindra tentu akan meminta jatah menteri di kabinet. Kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah akan sulit diakomodasikan saat di parlemen dan akan banyak menimbulkan pertentangan antara partai pendukung dengan partai di luar kabinet,” ungkap akademisi dari Universitas Sriwijaya ini.

Mantan anggota KPUD Sumsel ini juga memperkirakan partai-partai pesaing

nya lebih cenderung ke oposisi. Konsep perubahan yang diusung partai pendukung Anies - Muhaimin akan sulit masuk ke ruang politik pembangunan IKN.

Bahkan bisa terjadi kolaborasi antara PKS dan PDIP untuk bersama-sama di jalur oposisi ditambah partai-partai lain. Hal ini tentu akan menyulitkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

“Hal ini pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden SBY yang sempat mengalami kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan sehingga harus terjadi lobi-lobi politik dahulu. Akan terjadi banyak perdebatan di parlemen mulai dari pembangunan IKN, mobil listrik dan lainnya,” terang dosen FISIP Unsri ini.

Meski demikian Ardiyan Saptawan belum mau memastikan apakah Prabowo - Gibran akan menang di Pilpres 2024 ini karena semuanya masih dalam proses penghitungan suara. Sehingga potensi berlangsung dua putaran juga masih terbuka lebar.

“Namun siapapun presidennya, kemungkinan proses demokrasi di Parlemen akan berlangsung lebih berat karena tidak ada partai pengusung yang mendominasi di parlemen karena rakyat Indonesia saat ini cenderung lebih memilih orang daripada partainya,” ucap Ardiyan.

Harus Ada Partai Oposisi

Sementara Direktur Pusat Studi Politik Teras Indonesia, M Haekal Al Haffafah mengatakan, hasil hitung cepat dari lembaga survei menempatkan Prabowo - Gibran untuk menang satu putaran. Namun hasil itu bukan jadi acuan karena masih ada kemungkinan berlangsung dua putaran.

Hasil Pilpres ini juga berdampak pada partai pengusung seperti Gerindra, Nasdem, PDIP, dan PKS serta PKB yang mengalami kenaikan di parlemen. Di sisi lain ada beberapa partai yang diprediksi mengalami penurunan seperti PPP. Bahkan partai-partai baru juga sulit untuk masuk parlemen.

Meningkatnya partai-partai ini dinilai cukup baik karena akan menimbulkan persaingan demokrasi yang baik di parlemen. Namun mereka juga harus konsisten dengan tujuan awal.

Partai Nasdem, PKS dan PKB harus terus konsisten mengusung sikap perubahan yang mereka usung di Pilpres. Demikian juga dengan PDIP dan PPP harus berani bersikap untuk berada di jalur oposisi.

“Publik mengharapkan partai partai pendukung 01 dan 03 untuk konsisten dan berani berada di luar kabinet. Kalau mereka konsisten dan berada di jalur oposisi hal ini akan meningkatkan kepercayaan rakyat kembali pada partai politik,” ujar Haekal.

Diungkapkan Haekal, kondisi pemerintahan

h a n

saat ini yang mampu menguasai seluruh partai politik membuat sistem demokrasi tidak sehat. Partai politik seakan kehilangan identitas dan lebih melekat kepada penguasa.

Hal itu membuat kepercayaan rakyat pada parpol semakin tipis karena dinilai tidak ada lagi yang membawa kepentingan mereka di parlemen.

“Sekarang mau tidak partai politik ini bersikap konsisten karena ada kemungkinan juga Parpol ini akan kembali bersatu usai Pilpres dan hal itu bergantung pada negosiasi elit-elit politik. Namun publik ingin parpol konsisten sesungguhnya,” tegas Haekal.

Dia mengatakan, Pemilu 2024 ini publik cenderung memilih sosok atau orang daripada partai. Hal itu terjadi karena mulai hilangnya kepercayaan mereka terhadap partai untuk mampu mengakomodasi semua keluhan rakyat.

Sehingga munculnya partai oposisi akan lebih baik bagi iklim demokrasi Indonesia. Ada penyeimbang antara pemerintah dan luar pemerintah. Dampaknya akan hadir sikap kritis untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Hal ini tidak terjadi di pemerintahan Jokowi karena semua partai dikuasai. Hampir semua keputusan pemerintah tidak mendapat halangan dari parlemen. Perdebatan malah banyak terjadi di luar ruang parlemen sehingga kepercayaan rakyat pada partai juga semakin berkurang.

“Kita bisa lihat, saat ini kelompok-kelompok kritis seperti berjalan sendiri menyuarakan kritik mereka. Tidak ada dukungan dari partai politik karena semua sudah bergabung dengan pemerintah. Hal ini kurang baik sehingga kita berharap partai pengusung di Pilpres tetap konsisten dan berani bersikap oposisi,” ucapnya.

Sehingga tidak heran kalau kecenderungan mereka untuk memilih Anies Baswedan, Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo atas dasar sosok pribadinya bukan karena partai pendukungnya. ●RDR





Ade Indra Chaniago

MESKI PEMILU CURANG HORMATI HASIL AKHIR

Kecurangan politik di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 terpapar ke masyarakat dengan munculnya video atau sebuah film yang tersebar. Namun hasil akhir Pilpres tetap harus dihormati para pasangan calon, Parpol dan simpatisan sebab proses pemilihan tetap dinyatakan suara rakyat yang sah.

Adanya kecurangan atau tidak bisa diperlihatkan dengan adanya pembuktian. Bahkan semuanya bisa dikatakan bermain curang hanya saja tingkatannya yang berbeda. Sehingga apapun hasilnya, siapa yang menjadi pemenangnya harus tetap dihormati. Hasil Pilpres di Pemilu 2024 ini merupakan output dari kompetisi demokrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Relawan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Raka DD Shineba menuturkan kecurangan politik yang terjadi tidak berhubungan dengan hasil akhir pemilihan Pilpres. Dia menilai proses pemilihan Pilpres dilakukan serentak di seluruh Indonesia dinilai adalah suara sah dari rakyat Indonesia. Sementara kecurangan yang dipertontonkan saat ini masih dalam proses pembuktian.

"Kita semua sepakat (para paslon) hasil akhir itu harus diterima! Karena itu suara rakyat kalau kita anggap Pemilu itu tidak baik silahkan saja kalau hasilnya sah. Tersebar video kecurangan-kecurangan itu di masa tenang Pilpres hanya merusak pemilu," kata Ketua Persaudaraan 98 Sumsel ini.

Menurut DD Shineba, video kecurangan yang tersebar di masa tenang itu dibuat sebagai edukasi karena pemilihan adalah suara paling final dari rakyat. Tidak perlu memberikan reaksi yang berlebihan. Dia merasa anehnya video itu tersebar di penghujung proses pemilihan bukan saat berjalannya kampanye.

"Paling dirugikan demokrasi Indonesia pemilu kita, kenapa karena ada suatu niat tidak mau menciptakan suasana aman dan damai. Semua paslon sudah menjalankan semua proses dengan

baik mulai pencalonan seleksi dan sampai kampanye berjalan dengan riang bergembira," ucapnya.

Mantan aktivis 98 ini melanjutkan semua video kecurangan yang tersebar itu tidak akurat karena semua berita lama dan data lama bahkan terkesan tidakimbang. Semua video tersebar itu juga hanya mengkritik era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) namun tidak ada ukuran lain dari era-era pemerintah sebelumnya.

"Kecurangan-kecurangan yang disebarkan itu maksudnya apa. Kalau menilai penyelenggara curang kenapa tidak menghadirkan Bawaslu dan KPU saja. Video itu juga berita lama hasil survei lama dan tidak menghubungkan masalah lalu terfokus kepada Jokowi saja kenapa begitu," paparnya.

DD Shineba berkata dia menolak video itu adalah bentuk kecurangan dan hanya menjadikannya edukasi politik saja bukan acuan kecurangan politik, bukan karena dia membela paslon nomor urut 2. Dia tetap menegaskan hasil akhir dari Pilpres sah murni dari pilihan rakyat Indonesia.

"Saya mengatakan itu bukan karena video tersebar menyerang paslon nomor urut 2 dan Jokowi. Sebab biasa saja kalau dalam pertandingan kalau survei tertinggi itu diserang," pungkasnya.

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Sumsel wakil dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Antoni Toha menyebutkan hasil dari Pilpres adalah sah karena dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun untuk proses pemilihan apabila terbukti ada kecurangan pihaknya sebagai kuasa hukum AMIN akan tetap melayangkan protes ataupun gugatan secara hukum.

"Proses pemilihan berjalan baik dan benar tidak ada kecurangan tidak

ada kewenangan jabatan dari penyelenggara pemilu kita terima. Kalau terbukti ada pelanggaran pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku pastinya akan kita layangkan surat keberatan dan gugatan," tegasnya.

Dia menyebutkan kecurangan yang tersebar dari video bisa saja dianggap sebagai edukasi untuk kecerdasan berpolitik saja. Sebab tersebar video di masa tenang dan detik-detik pemilihan berlangsung tidak bisa lagi direspon oleh pihaknya.

"Ibarat lagu video ini diputar di waktu yang salah, karena sekarang mau apa lagi masa tenang dan pemilihan berlangsung. Sekarang kami dari Tim Hukum tidak bisa melakukan respon dan menjadikan ini peluru serangan-serangan baru," jelasnya.

Antoni Toha menilai tersebar video kecurangan politik itu secara tidak langsung tidak berdampak kepada paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari itu pihaknya tidak terlalu khawatir tiba-tiba munculnya video kecurangan politik tersebut.

Sehingga dia menilai video itu anggap saja edukasi demokrasi mencerdaskan rakyat dalam politik kami anggap begitu saja meski mereka tidak tahu tujuan mereka apa, namun adanya video itu sebenarnya tidak berdampak kepada paslon-paslon.

"Berdampak itu lebih kepada pemerintah karena yang patut melakukan kecurangan itu pemerintah yang bisa mengacaukan dan menghentikan Pemilu lebih tepatnya mungkin oknum dari pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kami anggap video ini hanya untuk membuka mata rakyat dan mencerdaskan

saja," tegasnya.

Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Sumsel, Zeldi Dwitama wakil dari paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga menilai apapun hasilnya tetap sah. Namun adanya surat suara yang tidak terpakai atau suara golput itu disinyalir akan berbahaya bisa digunakan untuk mengubah hasil suara di Pilpres.

"Apun hasilnya kita terima dinilai sah, tetapi paslon juga punya hak nanti melayangkan gugatan apabila ditemukan kecurangan. Sebab ada 20 persen nantinya bisa ada surat suara yang tidak dipakai harus kembali lagi mulus jangan digunakan. Ini yang akan kita pantau apabila ada akan kita layangkan gugatan-gugatan," tegas Zeldi.

Dia menyebutkan dari video itu mengangkat beragam strategi kecurangan terutama politisasi bansos terlebih lagi bansos dari Jokowi dijadikan bahan untuk kemenangan paslon tertentu. Dia pun menyebutkan Gibran melakukan blusukan dirinya sebagai pejabat Negara dan melakukan sosialisasi kampanye ke masyarakat.

"Tetapi apabila dia melihat ada banner rumah warga terpasang Ganjar dia melengos (tidak mendatangi rumah tersebut). Semua itu fakta yang kita dapat di lapangan, walaupun dari video itu semua paslon melakukan kecurangan yang paling dominan paslon nomor urut 2," ungkapnya.

Sementara itu pengamat politik Ade Indra Chaniago menuturkan sebaliknya baginya video tersebar itu memiliki dampak positif untuk rakyat Indonesia. Baginya rakyat Indonesia harus membiasakan diri dengan negatif campaign dengan belajar dari video tersebut. Menurutnya adanya video ini tidak membuat demokrasi Indonesia tercoreng malahan sebaliknya bisa mencerdaskan rakyat Indonesia.

"Saya berharap hal-hal ini biasa tidak boleh yang jelek ditutup-tutupi biar masyarakat cerdas. Adanya video ini masyarakat bisa sadar kalau memilih yang salah mereka akan melahirkan koruptor baru. Hasil dari Pilpres sah kalau ada masalah tentunya silahkan untuk melayangkan gugatan dari tim hukum setiap paslon," ucapnya. ●RDR





“Tingkat kepuasan pemerintah dipimpin Jokowi mencapai 75 persen. Nah, ini sangat berdampak seperti IKN sebagai program yang akan dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran”

Fatkurohman

EFEK JOKOWI MASIH KUAT DI DAERAH

Walau banyak yang memprediksi kalau pelaksanaan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran namun pasangan calon (Paslon) berhasil tampil meyakinkan dengan kemungkinan menang dalam satu putaran. Kemenangan besar ini sudah diprediksi sebelumnya dengan berbagai faktor pendukung salah satunya sosok Joko Widodo yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga survei menyatakan kalau pasangan Prabowo - Gibran berhasil menang telak dengan diatas 50 persen. Meski hasil quick count ini bukan hasil hitungan real Komisi Pemilihan Umum (KPU) namun diperkirakan hasil tidak jauh berbeda.

Kemenangan besar tersebut menempatkan Paslon 02 berhasil unggul hanya dalam satu putaran saja. Hal itu sesuai target Prabowo - Gibran selama ini.

Menurut koordinator wilayah Sumsel Public Trust Institute (Putin) yang merupakan Lembaga Survei dan Kajian Politik Kebijakan, Fatkurohman, Pilpres 2024 sejak awal sudah kental terjadi pertarungan antara elektoral Jokowi melawan moncong putih julukan Partai PDI Perjuangan.

Kondisi itu sangat mempengaruhi hasil dari quick count dan berdampak besar kepada kemenangan telak paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dari para pesaing lainnya di Pilpres 2024.

“Salah satu faktornya adalah Presiden Joko Widodo yang menjadi salah satu magnet ketika Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Jokowi adalah

PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan adalah Joko Widodo sekarang di tahun 2024 terjadi perpisahan. Tentunya ini membangun persepsi publik masuknya Gibran putra Jokowi sehingga pemilih akhirnya

memilih pasangan ini,” urai Bung FK demikian sering disapa.

Meski tidak menyatakan langsung dukungannya kepada Prabowo - Gibran namun kedekatan Jokowi pada paslon ini menjadi simbol dukungan. Sehingga secara elektoral, Prabowo - Gibran paling kuat.

Sejak awal Pilpres 2024 terjadi persepsi publik terbentuk adanya pertarungan antara Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo di tubuh PDI Perjuangan. Selanjutnya terjadi peperangan elektoral keduanya antara PDIP dan Joko Widodo siapa yang paling kuat atau berpengaruh di hati rakyat.

“Pilpres 2024 ini menariknya bagaimana membangun elektoral dan persepsi publik sampai ke kalangan bawah. Jelas sekarang elektoral PDI Perjuangan dan Joko Widodo saat ini yang berpengaruh di Pilpres 2024 sekarang,” ucapnya.

Diakuinya Jokowi efek sangat menguntungkan Prabowo Subianto menang dalam quick count Pilpres 2024, padahal saat munculnya nama Anies Baswedan elektoral lebih tinggi dari Prabowo. Kondisi itu membuat Prabowo membutuhkan elektoral baru dengan strategi menarik anak Jokowi Gibran sebagai cawapres untuk mendapatkan Jokowi efek tersebut.

“Ditinjau dari elektoral di Pilpres 2019

Jokowi memiliki 56 persen elektoral dan Prabowo 44 persen elektoral. Lalu di Pilpres 2024 masuknya Anies Baswedan sebagai salah satu kontestan membuat elektoral Prabowo turun menjadi 19 persen karena elektoral Anies Baswedan lebih tinggi darinya. Nah ini membuat Prabowo Subianto menarik Gibran untuk mendapatkan elektoral Jokowi yang sekarang sangat berdampak kemenangan elektoral hasil dari quick count hari ini,” jelasnya.

Menurutnya hasil dari debat Pilpres 2024 tidak terlalu berdampak signifikan. Dia menilai debat Pilpres 2024 hanya berefek kepada pemilih yang belum menentukan pilihannya notabene para pemilih rasional.

Jokowi efek bukan hanya Joko Widodo sebagai Presiden atau incumbent yang mempunyai kekuasaan. Namun tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintah Jokowi juga lebih besar dirasakan. Hal itu menentukan pilihan agar program bisa dilanjutkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

“Tingkat kepuasan pemerintah dipimpin Jokowi mencapai 75 persen. Nah ini sangat berdampak seperti IKN sebagai program yang akan dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran menjadi faktor juga,” pungkaskannya.

Sementara itu, berdasarkan hasil quick count sementara yang masuk, pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan di atas 50 persen suara.

Bingung Hasil Kampanye

Menanggapi hasil ini, Ketua Ganjaris Sumsel Desmon Simanjuntak mengatakan, merasa bingung dengan hasil quick count karena dianggap tidak sesuai fakta lapangan. Bahkan hasil dari quick count paslon nomor

urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD paling rendah dari ekspektasi mereka. Padahal Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga memiliki basis massa terbesar di terutama di Pulau Jawa.

“Kalau boleh jujur kita juga mengalami kebingungan! Di penutupan kampanye terakhir kita masuk ke Solo bahkan estimasi massa membludak sampai diarak keliling Solo mereka berteriak Solo bukan Gibran. Makanya saya sempat bertanya apakah hasil quick count benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Desmon Simanjuntak menyebutkan Jokowi efek itu tidak ada! Dia malah menegaskan Presiden Joko Widodo menggunakan power kekuasaan akhirnya berdampak kepada hasil quick count hari ini.

“Kalau bicara objektif kita lihat kembali rekam jejak yang dilakukannya lebih menguntungkan saat putra mahkota masuk jadi kandidat saat itu. Buktinya ada kebijakan seperti Bansos dibagikan di istana seakan itu buah karya Pak Jokowi dan kenaikan gaji. Kami berasumsi ada campur tangan penguasa kepala-kepala daerah yang ikut membantu,” ungkap Desmon.

Sejarah juga mencatat, baru Jokowi sebagai Presiden yang mengumumkan terang-terangan mendukung untuk kampanye. Sehingga bukan karena faktor elektoral melainkan ada peran kekuasaan yang ikut bermain.

Namun apapun hasilnya, Paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerima hasil akhir keputusan KPU. Kendati di quick count kekalahan telak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD jelas terlihat.

“Kami tetap optimis masih menunggu hasil dari keputusan resmi KPU penghitungan suara. Kalau sekarang kita belum mau percaya dengan hasil quick count. Namun apabila hasilnya sama kami ucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran,” pungkaskannya.

Belum Pasti

Sementara relawan paslon Prabowo - Gibran dari Persaudaraan 98, Syafran Syaropi mengatakan, mereka tidak mau jumawa dari hasil quick count sebab semuanya bisa saja berubah dan itu akan berdampak buruk bagi semua simpatisan.

“Kalau melihat ini saya sangat senang. Seperti mau lompat dari gedung. Namun di KPU itu masih banyak suara belum masuk kita jangan jumawa dulu sebelum ditetapkan resmi belum keluar,” kata dia.

Diakuinya strategi kemenangannya sangat berbeda dari para kontestan lain mereka lebih terfokus kepada menggunakan gerakan senyap yang diyakininya tidak dilakukan paslon lainnya.

Dia menyebut Jokowi efek memang benar ada namun dia juga berkata Prabowo Subianto pun memiliki efek yang luar biasa. Dia berkicau bahwa tidak hanya para calon pemilih saja balita yang masih belum paham sesuatu apabila ditanya pasti ingin memilih Prabowo.

“Anak kecil saja kalau ditanya mau memilih siapa mereka berkata Bowo Bowo. Itu jelas Prabowo Subianto juga memiliki dampak bukan hanya adanya Jokowi saja,” ucapnya. ●RDR



“Kita anggap saja Prabowo Subianto sudah jadi presiden. Dia akan sulit membangun kabinet memiliki kekuatan, sebab adanya politik balas budi”



Muhammad Husni Thamrin

PENGARUH OPOSISI AKAN SAMPAI KE DAERAH

Keluarnya beberapa partai dari pemerintah Presiden Joko Widodo akan berimbas pada kemenangan Prabowo - Gibran. Bila memang menang satu putaran akan menimbulkan kekuatan oposisi yang sama besarnya dengan pemerintah. Pengaruh dan pengawasan pemerintah tidak hanya ada tingkat pusat tapi juga hingga ke daerah-daerah.

Kuatnya oposisi yang akan dibentuk nanti akan sangat mempengaruhi pemerintahan Prabowo - Gibran. Kepemimpinan keduanya disinyalir akan dikontrol atau dipantau oleh partai oposisi yang memaksa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan janji-janji manis saat kampanye.

Pengamat Politik Sumatera Selatan (Sum-sel), Bagindo Togar Butar-Butar mengatakan, hasil quick count tidak usah diragukan lagi karena semua instansi yang mengumpulkan sampel suara memiliki kredibilitas terpercaya.

Dia mengakui kemenangan hanya menunggu real quick count saja dari keputusan KPU dan pengumuman resmi kemenangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Sudah jelas nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menang. Tinggal siapa-siapa saja yang akan dimasukkan ke parlemen tentunya para partai koalisi,” kata Direktur Forum Demokrasi Sriwijaya ini.

Bagindo Togar mencermati ada yang menarik dari sistem demokrasi terjadi nanti sebab dari dua kontestan yang kalah memiliki partai nantinya menjadi kekuatan baru non pemerintah. Partai pendukung tentunya menjadi partai pemerintah dan partai pesaing akan menjadi oposisi di pemerintahan.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) tentunya menjadi partai penguasa kedepannya. Mereka-mereka inilah

yang nantinya akan memimpin Indonesia.

“Nah pemerintah Prabowo pastinya akan dikontrol oleh partai non pemerintah untuk mereka benar-benar harus menunaikan janji kampanyenya. Artinya check and balance akan terjadi bisa mengarahkan negara untuk lebih bersifat demokratis,” ucapnya.

Dari partai yang di bawah pemerintah Jokowi saat itu hanya Demokrat yang baru bergabung bagi Bagindo Togar itu hal yang wajar karena ini bagian dari strategi. Dimana Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kedepannya apabila ingin mencalonkan diri sebagai Presiden harus masuk dulu ke sistem pemerintahan agar partai bisa mendapatkan kekuatan nantinya.

“Ini strategi AHY biar bisa mencalonkan diri kedelapan dulu dia gagal karena bukan dari partai yang ada di pemerintahan. Politik kepentingan untuk memenangkan pertarungan wajar-wajar saja, lagi pula apa untungnya membuat portofolio buruk untuk apa jadi oposisi terus,” jelasnya.

Dari sini Bagindo Togar juga khawatir menurut rekam jejak Jokowi suka menarik semua oposisi seperti Prabowo Subianto masuk ke parlemen agar bekerja di bawahnya menjalankan sistem pemerintahan.

Dia mensinyalir bisa saja semua partai oposisi akan ditarik seperti yang dilakukan Jokowi diterapkan juga oleh Prabowo Subianto.

Oposisi juga tidak akan bisa terjadi kalau semua partai itu tergiur dengan jabatan ditawarkan nantinya. Tetapi kalau saya melihat hanya PKS yang mampu bertahan di era Jokowi tetap komitmen menjadi partai oposisi,” ucapnya.

Diakuinya Prabowo Subianto juga melakukan

taktik untuk melancarkan niatnya menjadi Presiden di Pilpres 2024 ini. Bagi Bagindo Togar yakin Prabowo Subianto tidak akan menang apabila dia tidak ikut bergabung bersama tim Jokowi.

“Prabowo mengalah dari lawan politiknya Jokowi demi mendapatkan kekuatan dan memenangkan pemilihan hari ini. Kalau tidak ada kekuatan Jokowi mana mungkin Prabowo menang,” ceplosnya.

Menurutnya untuk partai yang meroket di Pilpres 2024 tentunya Gerindra, Golkar, PAN dan Demokrat dan menjadi partai pemerintah. Namun PDI Perjuangan dinilai masih tetap stabil, walaupun kalah masih mendapatkan nilai tertinggi di Pemilu. Sedangkan untuk sistem pemerintahan jelas Prabowo Subianto akan melanjutkan semua program Jokowi.

“Untuk pemerintah sudah jelas tidak ada beda pastinya Prabowo akan menjalankan semua program Jokowi. Karena alasan itulah Prabowo dipilih Jokowi untuk berdamai dengan Gibran,” pungkasnya.

Potensi Bersatunya PKS dan PDIP

Pengamat politik dan kebijakan publik, DR Muhammad Husni Thamrin menyebutkan Prabowo

Subianto akan sulit menjalankan dan menyusun kabinetnya karena dampak dari politik balas budi. Itu dampak dari semua partai politik yang mengunggahnya dan relation juga harus dipikirkan masuk ke dalam susunan kabinet

“Kita anggap saja Prabowo Subianto sudah jadi presiden dia akan sulit membangun kabinet memiliki kekuatan sebab adanya politik balas budi. Seperti ini ada saja kabinet yang memiliki potensi namun tidak bisa direkrut ada di partai oposisi, itu yang akan terjadi nantinya,” kata dia

Menurut pengajar di Universitas Sriwijaya ini, hadirnya oposisi sangat baik untuk mengontrol pemerintah terlebih lagi diprediksi pastinya PDI Perjuangan dan PKS kuat akan memilih menjadi oposisi pemerintahan.

Terlebih PDIP menjadi oposisi terkuat karena menjadi partai mendapatkan suara terbanyak di pemilu dan moncong putih juga sudah memiliki pengalaman menjadi oposisi di era SBY.

“Walaupun ditawarkan PDI Perjuangan dan PKS tidak akan mau bergabung di kabinet saya rasa pasti. Kalau partai koalisi di AMIN kemungkinan iya oposisi pastinya akan terjadi di pemerintahan Prabowo dan Gibran,” tuturnya.

Selanjutnya program Jokowi akan dilanjutkan oleh Prabowo dengan program lain yang ditawarkan seperti makan siang gratis. Kondisi itu cukup sulit dengan beban APBN dan anggaran minim terlebih lagi Bansos untuk rakyat dari program Jokowi.

“Tantangan terberat pastinya menjalankan semua program kedepannya dengan anggaran minim. Terlebih lagi oposisi akan mengontrol jalannya pemerintah ini kedepannya,” ucapnya

Dilanjutkannya adanya Gibran tentu program Jokowi seperti IKN akan terus dilanjutkan karena peran sang anak untuk menjalankan program-program tersebut.

“Kalau Prabowo Subianto kedepannya bisa dikontrol oleh Gibran tidak juga karena apabila dia bisa merangkul partai-partai seperti Jokowi. Namun adanya Gibran program Jokowi pastinya akan bisa tetap berjalan,” pungkasnya. ●RDR





“Saya lihat kecenderungannya mungkin PDIP bisa jadi potensial akan menjadi partai oposisi pertama, meskipun ada kemungkinan pembicaraan di PDIP (bergabung di pemerintahan mendatang), tapi PDIP akan potensial menjadi partai oposisi besar di parlemen”

Arya Fernandes

PDIP BERANI JADI OPOSISI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemungkinan besar masih akan menjadi pemenang dalam pemilihan legislatif, meski pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah di pemilihan presiden dan wakil presiden. Partai banteng pun diprediksi bakal menjadi oposisi dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, memberikan pesan jika PDIP menang di pemilihan legislatif dan masuk ke parlemen nantinya, maka harus berani jadi oposisi di legislatif.

“Pesan saya kalau nanti PDIP di parlemen mendapatkan suara paling banyak ya harus berani jadi oposisi,” kata Rudy, Rabu, 14 Februari 2024.

Rudy mengatakan PDIP pernah menjadi oposisi selama 10 tahun. Hal tersebut dilakukan ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden.

Rudy juga mengaku tak kaget dengan hasil penghitungan sementara pilpres yang menunjukkan keunggulan Prabowo-Gibran. Dengan melihat berbagai pertimbangan, Rudy menyebut, keunggulan suara Prabowo-Gibran itu tak terlalu mengejutkan.

Salah satunya karena paslon nomor urut 02 itu memiliki koalisi yang cukup gemuk. Sementara Ganjar-Mahfud hanya didukung kader militan dari PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

“Kami tetap menunggu hasil dari KPU. Namun, kami tetap menyadari bahwa kami koalisi minim. Dan, Hanura-

Perindo tidak punya kursi di DPRD. Semua mengakui yang bekerja hanya PDI Perjuangan saja dari awal sampai akhir (di Solo),” kata Rudy.

Mulai dari awal kampanye hingga hari pencoblosan, Rudy mengaku hanya bisa menggerakkan kader militan dari PDIP karena koalisinya di Solo tidak siap. Belum lagi, pihaknya pun mencium adanya indikasi kecurangan-kecurangan lain, mulai dari bantuan sosial (bansos) yang dibagikan secara masif jelang pemilu dan sejenisnya.

“Sebenarnya kami menyoroti seperti itu, apalagi cawapresnya saja wali kota. Tapi apa daya, kita enggak punya kekuasaan. Beliau mau ke sana kemari sah-sah saja karena masih sebagai kepala daerah,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Rudy pun mengaku akan legowo apapun hasilnya. Meski demikian, dia mengemukakan Kota Solo yang dikenal sebagai kandang banteng belum tentu jebol kendati kalah dalam perolehan suara pilpres.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menyebut partainya sudah terbiasa melawan gelombang besar dalam perjalanan perpolitikan Tanah Air. Sebab itu, partai banteng sudah memahami betul pesan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno tentang konsisten terhadap pergerakan.

Hasto menegaskan, Pemilu 2024 dan hasil berdasarkan hitung cepat tak akan menurunkan semangat. Sejarah sudah membuktikan PDIP selalu kuat menghadapi setiap badai di kancah perpolitikan Indonesia.

“Kepada seluruh kader PDI Perjuangan kami ingatkan pesan dari Bung Karno bahwa di dalam perjuangan itu, tidak ada yang sia-sia, no sacrifice is wasted,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024.

Hasto men-

gatakan, kesetiaan terhadap perjuangan dalam menghadapi gelombang di kancah perpolitikan akan berbuah ketika partai menerapkan kesabaran revolusioner.

“Kesabaran revolusioner itu lah yang akan menentukan, karena pemilu tidak ditentukan oleh hasil, tetapi oleh pas-capemilu itu bagaimana kerusakan-kerusakan demokrasi akan membawa suatu implikasi yang sangat serius di dalam kehidupan politik kita. Demikian,” lanjut Hasto.

Terkait PDIP bakal menjadi oposisi karena Ganjar-Mahfud kalah telak di Pilpres 2024, Hasto menyebut bahwa soal oposisi atau tidak itu masih kejauhan. Karena Ganjar-Mahfud saja saat ini akan membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan data dugaan kecurangan Pilpres 2024, sembari menunggu penghitungan resmi dari KPU.

“Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,” kata Hasto.

Sebelumnya, Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, mengatakan, PDIP cenderung ke arah oposisi jika pasangan capres dan cawapres yang mereka usung tidak lolos atau gagal masuk ke putaran kedua Pilpres 2024.

Andi sendiri mengaku sudah siap menjadi oposisi jika Ganjar-Mahfud harus kalah di putaran pertama. Lagipula, lanjut dia, berada di seberang pemerintahan atau oposisi merupakan karakter terkuat PDIP.

“Seru lho jadi oposisi bersama Ibu Mega, Mas Ganjar, Pak Mahfud, bersama Andika, Tuan Guru Bajang. Itu akan menjadi kelompok oposisi yang menarik di Indonesia kalau itu terjadi,” kata Andi, Jumat, 9 Februari 2024.

Namun, Andi juga mengaku belum tahu sepe-

nuhnya soal keputusan ke depan terkait partai jika memang pasangan yang diusungnya tak lolos ke putaran kedua. Terkait dengan rencana koalisi, dia mengatakan, semua keputusan utama ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

“Keputusannya, kan, putusan di partai di Ibu Mega, saya tidak tahu keputusannya. Tetapi biasanya dinilai spektrum ideologinya, lalu interaksi elitnya, baru kemudian membicarakan kepentingannya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, memprediksi, PDIP akan menjadi partai pertama yang akan mendeklarasikan diri menjadi oposisi untuk pemerintahan terpilih tahun 2024-2029.

“Saya lihat kecenderungannya mungkin PDIP bisa jadi potensial akan menjadi partai oposisi pertama, meskipun ada kemungkinan pembicaraan di PDIP (bergabung di pemerintahan mendatang), tapi PDIP akan potensial menjadi partai oposisi besar di parlemen,” ucap Arya saat konferensi pers di Gedung Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Februari 2024.

Selain itu, Arya juga beranggapan bahwa potensi keberimbangan antara kekuatan di lembaga eksekutif dan legislatif jika hasil Pilpres tak berbeda jauh dengan penghitungan cepat yang pihaknya lakukan.

Ia pun menuturkan bahwa keadaan pascapemilu mendatang akan berbanding terbalik dengan masa pemerintahan saat ini, di mana kekuatan di parlemen 80 persen di antaranya didominasi oleh partai koalisi.

“Saya menduga seperti halnya pascapemilu kali ini parlemen kita akan semakin kuat, mungkin itu juga akan memberikan kontrol yang kuat juga bagi pemerintahan baru yang terpilih,” sebutnya. ●RDO



“Rakyat sudah buat keputusan. Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo semua harus benar-benar rendah hati menerima apa kata rakyat”

Mardani Ali Sera



PEMILIH PKS PALING LOYAL

Pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki kecenderungan loyalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih partai politik lainnya. Selain dilihat dari konsistensinya memilih partai politik yang sama dengan pemilu sebelumnya, loyalitas pemilih juga tampak dari pilihan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik pilihannya.

Kecenderungan ini terbaca dari hasil survei pasca-pencoblosan atau exit poll yang dilakukan Litbang Kompas saat pemungutan suara pemilu yang digelar Rabu, 14 Februari 2024. Dari tingkat elektabilitas yang diraih partai politik peserta Pemilu 2024 dari survei ini, sebagian keterpilihan tersebut ditopang oleh pemilih yang sebelumnya juga memilih partai politik tersebut di Pemilu 2019.

Kelompok pemilih yang memberikan suaranya kepada partai politik yang sama saat di Pemilu 2019 ini yang masuk kategori sebagai pemilih loyal. Survei pasca-pencoblosan yang dilakukan terhadap 7.863 responden yang tersebar di seluruh provinsi ini menunjukkan PKS memiliki tingkat loyalitas pemilih yang relatif tinggi.

Dalam survei tersebut, sebanyak 70,2

persen responden pemilih PKS adalah sekaligus pemilih partai ini di Pemilu 2019. Artinya, kelompok pemilih ini cukup memiliki loyalitas yang tinggi terhadap PKS sebagai pilihan partai politik yang kembali mereka percaya dan dicoblos saat pemungutan suara lalu.

Tingkat loyalitas pemilih PKS dari hasil survei ini sebenarnya relatif konsisten karena terbaca juga di sejumlah survei sebelum pemilu yang dilakukan Litbang Kompas.

Pada survei Januari 2022, misalnya, tingkat loyalitas pemilih partai yang berbasis pemilih Muslim perkotaan dan terdidik ini mencapai 75 persen. Angka ini rata-rata relatif konsisten dengan survei-survei yang digelar selanjutnya.

Dibandingkan dengan partai politik lainnya, loyalitas pemilih PKS ini relatif lebih tinggi. Lihat saja dari partai berbasis ideologi yang kuat seperti halnya PKS, yakni PDIP. Dalam survei ini, tingkat loyalitas pemilih partai banteng cenderung menurun dibandingkan dengan survei sebelum pemilihan.

Dalam survei ini, loyalitas pemilih PDIP berada di angka 47,2 persen. Angka ini

relatif menurun jika dibandingkan dengan rata-rata loyalitas yang terbaca dalam survei-survei sebelum pemilu, yakni berada di atas angka 70 persen. Setidaknya, dalam survei-survei sebelum pemilu tersebut, karakter partai ideologis seperti PDIP dan PKS selalu memiliki tingkat loyalitas pemilih yang relatif sama.

Penurunan

loyalitas pemilih PDIP ini tentu tidak lepas dari fakta lapangan di mana terjadi perubahan konfigurasi politik di Pilpres 2024, yakni pecah kongsinya Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP dengan kebijakan dan langkah politik PDIP di pemilihan presiden.

Faktor Jokowi, diakui atau tidak, turut memberikan pengaruh yang sedikit banyak membuat daya elektoral PDIP cenderung terganggu, sehingga mengurangi potensi pemilih loyal mereka yang sebelumnya relatif konsisten memilih partai ini.

Loyalitas pemilih PKS juga jauh melampaui tingkat loyalitas dari pemilih partai politik lainnya. Termasuk partai-partai yang berada dalam satu koalisi bersama PKS yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, yakni PKB dan Partai Nasdem.

Hal ini termasuk juga bisa melampaui tingkat loyalitas pemilih Partai Gerindra meskipun partai ini memiliki sosok Prabowo Subianto. Selain sebagai ketua umum partai, Prabowo juga menjadi sosok calon presiden yang dalam hasil hitung cepat tercatat menjadi pasangan capres dan cawapres yang berpeluang besar unggul dalam satu putaran pemilihan presiden.

Presiden PKS, Ahmad Syaikh, mengaku bersyukur proses pemungutan suara berjalan dengan aman. Syaikh mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk mengawal perhitungan suara.

“Alhamdulillah kita telah melaksanakan pemilihan umum untuk Pilpres dan Pileg tahun 2024, tentu kita semua bersyukur pemilu dapat berjalan lancar dan aman. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi,” kata Syaikh dalam tayangan YouTube PKS TV, Rabu, 14 Februari 2024.

Syaikh mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang telah memberikan suaranya kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan calon legislatif dari PKS.

“Kami berharap semua pihak terutama para anggota, simpatisan, saksi-saksi PKS dan relawan pasangan AMIN di manapun berada untuk terus mengawal dan rekapitulasi suara hingga akhir. Terima kasih atas ketekunan yang telah ditunjukkan sebagai garda terdepan penjaga suara rakyat, tetap siaga dan tetap fokus,” tutur dia.

Kepada penyelenggara pemilu, Syaikh juga meminta agar bekerja secara profesional.

Dia menyebut hasil pemilu harus jujur dan adil.

“Kami juga meminta kepada seluruh penyelenggara pemilu agar selalu bekerja secara baik dan profesional dalam merespons berbagai laporan di masyarakat, kita tentu menginginkan hasil pemilu yang adil

dan jujur agar kualitas demokrasi dan bangsa kita semakin maju,” sebut dia.

Lebih lanjut, Syaikh juga mengajak masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan dan persatuan. Dia mengimbau agar tak adanya provokasi.

“Kami juga mengajak kepada semua pihak untuk senantiasa menjaga keseimbangan, kedamaian serta persatuan di tengah masyarakat, jangan terprovokasi dengan berbagai informasi menyimpang yang mengadu domba antar sesama anak bangsa,” kata Syaikh.

“Mari kita kawal dan jaga setiap tahapan pemilu dengan tetap mengedepankan kedamaian dan persatuan. Semua untuk masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia,” sambungnya.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, meminta semua capres dan cawapres menerima hasil Pilpres 2024. Ia mengatakan, pemilu sudah berlangsung dan masyarakat sudah menentukan siapa figur yang dipilih untuk menjadi pemimpinnya di masa yang akan datang.

“Rakyat sudah buat keputusan. Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo semua harus benar-benar rendah hati menerima apa kata rakyat,” ucap Mardani, Kamis, 15 Februari 2024.

Mardani juga menyambut baik rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun, Mardani yang partainya mengusung pasangan Anies-Muhaimin mengingatkan agar pertemuan itu tidak dilakukan untuk memprovokasi masyarakat yang masih sensitif setelah kontestasi elektoral berlangsung. Sebab, masyarakat sudah berpartisipasi dan bekerja keras untuk memberikan dukungan pada capres-cawapres maupun partai politik yang didukungnya.

“Tapi tensinya jangan justru dibakar dengan minyak amarah, kasihan masyarakat sudah bekerja, rakyat sudah memilih, bahwa cacat benar, bahwa ada kecurangan iya, bahwa ada proses di MK benar. Tapi kan semua itu sudah berlalu, rakyat sudah ke TPS, kita harus benar-benar menghargai apa yang rakyat putuskan,” papar dia.

Terakhir, Mardani juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku sudah memberikan selamat pada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Jokowi tidak mencerminkan sikap sebagai kepala negara yang mestinya bersabar menunggu KPU mengumumkan hasil resmi Pilpres 2024. Apalagi, Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap tidak netral setelah putranya, Gibran, menjadi cawapres Prabowo.

“Menunjukkan tidak dewasa dan tidak bijak. Mestinya beliau kian sudah tahu ada anaknya di situ. Sensitif, bisa menimbulkan banyak tafsir, jangan memperkeruh, sudah lupakan saja. Pilpres itu urusan rakyat, nanti KPU yang buat pengumuman, tugas saya ngurus negara, bikin harga beras murah, bikin pekerjaan murah, gitu saja. Jangan singgung-singgung, sudah tahu sensitif anaknya ikut, sudah tahu banyak yang nolak, sudah tahu lagi bergejolak,” imbuh dia. ● RDO





“Ada beberapa partai politik yang termasuk dalam kategori ‘parpol besar’ yang telah melakukan penjajakan dan pembicaraan awal dengan kami”

Ratu Dewa

MASYARAKAT PALEMBANG BUTUH PERHATIAN

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palembang tahun 2024 belum dimulai secara resmi, namun persaingan antar kandidat telah mulai terasa.

Beberapa tokoh muncul dalam survei yang mengidentifikasi calon yang potensial untuk menjadi walikota Palembang periode 2024-2029.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia Survey (ISU) dan dirilis pada Kamis 11 Januari 2024, nama Ratu Dewa mendominasi di antara tujuh kandidat yang disebut berpotensi maju dalam Pilkada Walikota Palembang.

ISU menyelenggarakan survei Pilkada Walikota Palembang dalam rentang waktu 23 November hingga 3 Desember 2023, dengan simulasi tujuh nama kandidat.

Selain Ratu Dewa, nama-nama kandidat lainnya adalah Basyarudin, Nasrun Umar, Fitrianti Agustinda, Charma Afrianto, Akbar Alfaro, dan Abdullah Taufik.

Direktur ISU, Khairil Amri menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan menggunakan

metodologi survei multistage random dengan sampel sebanyak 405 responden. Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar plus-minus 4 persen.

“Dari tujuh nama yang disurvei, Ratu Dewa menduduki peringkat pertama dengan 54,7 persen, diikuti oleh Fitrianti Agustinda dengan 17,7 persen. Sementara lima kandidat lainnya mendapat kurang dari 5 persen, dan sebanyak 18 persen responden belum memutuskan pilihan,” kata Khairil Amri.

Selain itu, ISU juga melakukan survei dengan membandingkan dua nama teratas secara langsung, yaitu Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda.

Hasilnya, Ratu Dewa unggul dengan 53,7 persen, sedangkan Fitrianti Agustinda mendapat 21,0 persen. Sebanyak 23,7 persen responden masih belum memutuskan pilihan, dan 1,2 persen tidak menjawab.

“Ratu Dewa masih mendominasi, namun kami akan terus melakukan survei menjelang tahun 2024,” tambah Khairil Amri.

Ratu Dewa sendiri saat ini sebagai Penjabat Walikota Palembang sejak 18 September 2023, dengan masa jabatan selama satu tahun. Sedangkan Fitrianti Agustinda adalah mantan Wakil Walikota Palembang periode 2018-2023.

Sebelumnya, Ratu Dewa telah diusulkan oleh Partai Golkar Sum-sel sebagai calon dalam Pilkada Palembang

2024 yang akan datang.

Ratu Dewa mengungkapkan bahwa ia menerima undangan dari Partai Golkar, namun karena statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ia tidak dapat menghadiri undangan tersebut.

“Dapat undangan dan pemberitahuan memang ada. Namun, sebagai PNS (ASN), saya harus menjaga netralitas,” ujar Dewa beberapa waktu lalu.

Sebagai seorang ASN, Ratu Dewa menyatakan bahwa ia harus netral dalam setiap pemilihan, termasuk Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pria yang akrab disapa Dewa ini pernah mengakui bahwa beberapa Partai Politik dalam kategori “parpol besar” telah melakukan penjajakan terhadap keseriusannya untuk maju sebagai kandidat Bakal Calon Walikota Palembang pada tahun 2024 mendatang. Bahkan jauh sebelum dirinya menjadi Pj Walikota Palembang.

“Dari beberapa partai politik, komunikasi politik telah sampai kepada kami. Ada beberapa partai politik yang termasuk dalam kategori ‘parpol besar’ yang telah melakukan penjajakan dan pembicaraan awal dengan kami. Saya cukup menghargai langkah-langkah tersebut,” katanya.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang wajar di Indonesia, khususnya di Palembang, dan ia bersyukur telah diakui dalam konteks tersebut.

Dewa juga menanggapi langsung masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat terkait kebutuhan mereka, seperti infrastruktur dan bantuan kepada masyarakat miskin.

“Masyarakat menginginkan respons yang cepat terhadap masalah-masalah ini, dan saya merasa terpanggil untuk meresponsnya,” ujar Ratu Dewa.

Terkait harapannya untuk Palembang ke depan, Dewa mengatakan bahwa banyak masukan yang telah diberikan kepadanya oleh berbagai pihak, termasuk akademisi, yang memiliki pandangan yang jelas terhadap kondisi Kota Palembang.

“Beberapa isu yang dibicarakan tidak jauh ber-

beda dengan isu-isu yang ada saat ini di Palembang, seperti banjir, sampah, kemuh, dan kemacetan. Saya berharap bahwa upaya untuk mengatasi masalah-masalah ini tidak hanya menjadi retorika atau upaya politik sesaat, tetapi merupakan panggilan hati untuk memperbaiki kondisi Palembang,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat menginginkan perhatian terhadap kebutuhan mereka, seperti peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Saya yakin bahwa masyarakat memiliki harapan yang sederhana, dan mereka butuh perhatian dari pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengamat politik Kota Palembang, Bagindo Togar yang menyebut bahwa setelah menjadi Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa dipastikan tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada 2024.

“Kalau Ratu Dewa sudah resmi jadi Pj Wali Kota Palembang, tentu saja dia tidak bisa mencalonkan diri di Pilkada 2024 nanti. Itu jelas ada peraturan dalam undang-undang,” katanya.

Dijelaskan Bagindo Togar, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada).

Tidak pada posisi sebagai pj, kecuali berhenti (sebagai pj). Larangan pj kepala daerah mencalonkan diri di pilkada tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada.

“Pasal itu menyebut salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah tidak berstatus sebagai pj kepala daerah,” sambungnya.

Kendati demikian, apabila pj ingin maju dalam pesta demokrasi diharuskan berhenti dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sehingga pj tidak bisa mundur sebagai kepala daerah secara mendadak untuk ikut pilkada.

“(Contoh) Pilkada 2024, dia pj sampai September 2024, ya gak bisa maju pilkada. Sekian bulan harus mundur,” terangnya.

Hanya saja, kata Bagindo Togar bahwa dari semua kandidat yang ada, Ratu Dewa dianggap layak menjadi Pj Wali Kota Palembang meski nyaris tanpa prestasi.

Sehingga pengamat politik Bagindo Togar meminta Ratu Dewa tidak hanya melakukan

pencitraan seperti yang dilakukan oleh Harnojoyo, sudah saatnya menunjukkan integritas prestasi dengan kerja nyata.

“Karena seperti yang kita tahu, Harnojoyo ini sangat piawai melakukan pencitraan. Ratu Dewa ini kan mabuk pencitraan” ulasnya. ●IRY



“ABM sudah memiliki pengalaman dan ketokohan politik yang mengakar, memiliki tim sukses yang lengkap dan solid”



Muhammad Asdar

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN AKAR MASALAH SULBAR

Mantan Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) periode 2017-2022, Ali Baal Masdar, secara resmi mengumumkan niatnya untuk kembali berkompetisi dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat 2024.

Pria yang akrab disapa ABM ini mengaku mendapat banyak dukungan dari masyarakat sehingga termotivasi untuk kembali maju. Terlebih, berdasarkan hasil survei namanya masih tertinggi dibandingkan kandidat lainnya.

“Dalam beberapa minggu terakhir, saya telah berkeliling menyapa warga di berbagai kabupaten di Sulbar, dan saya sangat gembira melihat dukungan besar dari mereka untuk saya kembali maju dalam Pilgub untuk periode kedua,” ungkap ABM.

Dijelaskan ABM, dalam tiga kali rilis survei Bacagub, namanya masih menduduki peringkat tertinggi dengan persentase mencapai 45%.

“Nama saya masih menduduki peringkat tertinggi dengan

persentase hingga mencapai 45%, dan para calon lain juga mengetahui hasil survei ini,” jelasnya.

ABM menambahkan dirinya berencana maju melalui partai Gerindra. Kendati begitu, dia masih memantau perkembangan hasil Pemilu dan berharap Gerindra bisa meraup kursi penuh di DPRD Sulbar.

“Tentu saya Gerindra, mudah-mudahan provinsi juga bisa masuk 10 persen ya, urutan ketiga atau kedua, kalau bisa pertama Gerindra,” katanya.

Selain itu, ABM mema-

parkan dirinya tidak akan tergesa-gesa memilih figur yang akan menjadi pasangannya di Pilgub Sulbar. Ia mengaku akan memilih figur yang surveinya juga tinggi

Di sisi lain, ABM menuturkan sudah bersepakat dengan adiknya yang juga mantan Bupati Polewali Mandar (Polman) Andi Ibrahim Masdar terkait siapa yang akan maju Pilgub Sulbar dengan melihat elektabilitas survei tertinggi.

“Siapa yang bagus surveinya. Nda (tidak) mungkin berdua maju nda mungkin. Dia sudah sepakat, saya juga sepakat,” ucapnya.

Untuk diketahui, ABM menjabat gubernur Sulbar periode 2017-2022. Selanjutnya Sulbar di-

impin Penjabat (Pj) Gubernur Akmal Malik selama 2022-2023 sebelum diganti Pj Gubernur berikutnya Zudan Arif Fakrullah.

Akademisi dan Pemerhati Sosial Politik Unifa Makassar, Muhammad Asdar menjelaskan, bacagub Sulbar dipastikan akan diisi dengan wajah-wajah lama. Namun, tiak menutup kemungkinan figur baru akan ikut ambil bagian.

“Mencuat sepuluh nama yang ramai menjadi perbincangan di media sosial yang menjadi kandidat kuat untuk Bacagub Sulbar 2024,” katanya.

Sepuluh nama yang dimaksud yakni incumbent Ali Baal Masdar, Enny Anggraeni Anwar, Prof Husain Syam, KH Syibli Sahabuddin, Kalma Katta, Suhardi Duka, Aras Tammauni, Agus Ambo Djiwa, Salim S Mengga serta H Hendra Singkaru.

Dari sepuluh nama tersebut bisa dilihat dari potensi ketokohan (elite), modal sosial, kapasitas dan kapabilitas masing-masing.

Seperti ABM sebagai incumbent tentunya sudah memiliki pengalaman dan ketokohan politik yang mengakar, struktur dan tim sukses yang lengkap.

“ABM sudah memiliki pengalaman dan ketokohan politik yang mengakar, struktur dan memiliki tim sukses yang lengkap dan solid,” jelasnya.

Masih banyak

kelompok survei.

Mereka cukup lama menduduki jabatan dan profesi masing-masing dan sering memberi advise, sumbangan ide dan pemikiran pada ruang dialog dan pengembangan propinsi Sulbar.

“Selain diuntungkan oleh kelompok, organisasi, dan irisan partai politik. Mereka juga diuntungkan oleh kekuatan media yang sering dimunculkan sehingga tingkat keterpilihan pada kekuatan besar kelompok milenial atau gen Z yang menguasai platform digital sering mengikuti melalui jejak digital sang figur,” jelasnya.

Salah satu faktor pendukung adalah kekuatan

partai politik. Hampir semua calon figur adalah ketua

di-

ket-

par-

hingga

ularitas

topang oleh

jabatan pres-

tisius sebagai

ketua.

Beberapa figur

juga memanfaatkan

akses langsung kepada

tokoh penyokong parpol

pemerintah yang sedang

berkuasa saat ini.

Isu dan pesan politik mela-

lui konten yang dikelola merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari

komunikasi politik dalam memenangkan

pilgub 2024 mendatang.

Setidaknya ada 3 dikotomi isu yang

harus dimainkan oleh setiap figur seperti

Isu resources. Perhitungan penggerak

birokrasi masih akut dalam keterbatasan

SDM di Sulbar sejak 15 tahun terakhir.

Isu Lintas Kelompok sejak berdiri dan

memisahkan diri dari induknya Sulsel,

kelompok pemrakarsa pendirian Sulbar

hampir semua termaginalkan dan terganti-

kan oleh pihak yang “tidak berkeringat”

sehingga dapat menimbulkan perpeca-

han karena ketidakpuasan akhirnya men-

uju dis-integrasi.

Isu pemerataan akses pendidikan dan

kesehatan. Terobosan layanan pendid-

ikan dan kesehatan masyarakat menjadi

catatan tersendiri bagi masyarakat prop-

insi Sulbar.

Isu ini menjadi strategis bila figur

mampu menghadirkan solusi dan pemec-

ahan akar masalahnya pemerataan dan

akses terutama menghadirkan sarana

dan prasarana pendidikan dan kesehatan

yang memadai,” pungkasnya. ● IRY





“Kalau sebagian besar publik menghendaki Dr Zul berpasangan dengan yang lain, kita akan realistis. Sekali lagi kalau itu keinginan publik, kita akan dengar”

Yek Agil

BANG ZUL-SITTI ROHMI PISAH DI PILGUB NTB

Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah akan berpisah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024.

Hal ini menyusul pernyataan Wakil Ketua DPW Partai Perindo NTB M Samsul Qomar bahwa Perindo akan mengukung eks Wakil Gubernur (Wagub) NTB Sitti Rohmi Djalilah sebagai Calon Gubernur (Cagub) pada Pilgub NTB 2024.

DPW Partai Perindo NTB telah menunjukkan niatnya untuk mencalonkan Sitti Rohmi Djalilah sebagai cagub dalam Pilgub NTB tahun 2024. Langkah ini didasarkan pada dukungan dari kader partai tersebut.

Wakil Ketua DPW Perindo NTB, Syamsul Qomar menyatakan, bahwa Rohmi telah berhasil mendampingi Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah.

“Di internal partai, kami merasakan dukungan yang kuat terhadap Rohmi sebagai calon gubernur NTB berikutnya,” ungkapnya belum lama ini.

Qomar juga telah berkomunikasi dengan sejumlah tokoh politik di NTB untuk mendapatkan dukungan bagi Rohmi, antara lain adalah eks Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhammad Iqbal, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, dan mantan Bupati Lombok Tengah, Suhaili.

Meskipun Rohmi sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait dukungan dari Perindo untuk maju dalam Pilgub NTB 2024, namun pada bulan Mei sebelumnya, dia menyampaikan senyuman saat ditanya tentang peluangnya sebagai cagub.

Sebelumnya, beberapa nama juga telah disebut-sebut akan ikut bertarung dalam Pilgub NTB 2024, seperti Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, serta Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.

Bahkan, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan dukungannya terhadap Sekretaris Daerah NTB tersebut.

Meskipun begitu, Rohmi menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut. Selain tersenyum, Rohmi hanya meminta doa terbaik untuk dirinya.

“Diharapkan doa yang baik-baik,” ucap Rohmi.

Rohmi mengungkapkan bahwa saat ini ia akan fokus untuk memenangkan Partai Perindo di NTB. Dengan sumber daya yang tersedia, Rohmi yakin bahwa partainya memiliki potensi untuk

menjadi pemenang di NTB.

“Kita harus berupaya untuk menjadi yang terbaik. Sebelum pemilihan, kita harus memastikan bahwa kita tidak hanya memiliki rencana di atas kertas. Partai Perindo memiliki basis yang kuat di NTB. Yang penting adalah kita tidak boleh lengah,” ungkap mantan ketua DPW Nas-Dem NTB tersebut.

Rohmi menegaskan pentingnya solidaritas di antara semua bacaleg di daerah pemilihan masing-masing. Bacaleg Partai Perindo, katanya, tidak boleh menganggap rekan sesama bacaleg sebagai lawan, tetapi sebagai sekutu dalam perjuangan bersama.

Ia menekankan perlunya kesatuan visi dan fokus perjuangan di antara bacaleg Partai Perindo.

“Yang harus ditekankan adalah bagaimana kita dapat bersatu di dalam partai sehingga bacaleg di satu daerah pemilihan tidak saling bersaing, tetapi tetap waspada terhadap lawan dari partai lain. Energi kita harus difokuskan untuk mengalahkan bacaleg dari partai sendiri di daerah pemilihan masing-masing,” tegas Rohmi.

Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan tanggapannya terhadap usulan dari Partai Perindo yang mendukung Sitti Rohmi Djalilah sebagai cagub

dalam Pilgub NTB 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS NTB, Yek Agil, menilai dukungan terhadap Rohmi tersebut hanyalah sebagai aspirasi semata.

“Kami tidak merespons secara personal. Itu hanya pendapat individu saja. Kecuali jika pimpinannya (Ketua DPW Perindo NTB Khairul Rizal) yang berbiacara, maka kami akan merespons,” ujar Yek Agil.

Seperti yang diketahui, Rohmi merupakan mantan wakil gubernur NTB yang mendampingi kader PKS, Zulkieflimansyah, selama masa jabatan gubernur NTB periode 2018-2023. Masa jabatan Zul-Rohmi berakhir pada 19 September 2023 lalu.

Yek Agil menegaskan bahwa PKS telah sepakat untuk kembali mengukung Zul dalam Pilgub NTB 2024.

Ketika ditanya tentang calon wakil gubernur (cawagub) yang akan mendampingi Zul, ia menyatakan bahwa pihaknya akan mengam-

bil keputusan secara realistis. Termasuk kemungkinan Zul kembali berpasangan dengan

Rohmi.

“Politik itu dinamis. Kami akan berpasangan dengan siapa pun yang diyakini bisa menang. Jika publik mendukung pasangan dengan Ibu Rohmi, kami akan mendukungnya. Jika publik lebih condong pada pilihan lain yang memungkinkan kami menang, kami akan realistis,” jelasnya.

Yek Agil menjelaskan Pilgub NTB 2024 masih sangat dinamis. Pihaknya akan mencari pasangan Dr Zul sebagai calon wakil gubernur NTB yang berpotensi menang.

Begitu juga mengenai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB Zul-Rohmi jilid II masih dilakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Apabila masyarakat masih menginginkan Zul-Rohmi jilid II, maka itu akan dilakukan.

“Kalau sebagian besar publik menghendaki Dr Zul berpasangan dengan yang lain, kita akan realistis. Sekali lagi kalau itu keinginan publik, kita akan dengar,” ucapnya.

Dia juga menyatakan bahwa PKS masih menunggu hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Menurutnya, hasil pileg akan menjadi salah satu pertimbangan bagi partai dalam menghadapi Pilgub NTB 2024.

“Karena hasil pileg akan menjadi salah satu pertimbangan bagi partai mereka dalam menghadapi Pilgub NTB 2024,” tegasnya.

● IRY



“Peninjauan ini kita lakukan untuk memberikan motivasi masyarakat agar berbondong-bondong datang untuk memilih, kita harus gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya”

Agus Fatoni



AGUS FATONI TINJAU TPS DI KOTA PALEMBANG

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meninjau langsung sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Palembang dengan mengendarai sepeda motor.

Dalam kunjungannya kali ini Agus Fatoni didampingi oleh Pj Walikota Palembang Ratu Dewa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel dan Palembang, Rabu 14 Februari 2024.

Peninjauan diawali dengan mengunjungi TPS 12 berlokasi di Jl Kelapa Gading 4 No. 667 RT 10 RW 03, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Kemudian dilanjutkan dengan peninjauan titik kedua di TPS 17 berlokasi di depan Kantor Lurah Talang Semut, Kota Palembang.

Selanjutnya, Fatoni dan rombongan melanjutkan peninjauannya di sebrang Ulu All kota Palembang, yakni TPS 32 yang berada di Jl D.I Pandjaitan, Lrg Jama Jama, Kecamatan Plaju Ulu. Terakhir, Fatoni menuju TPS 26 yang berada di Jl. Urip Sumaharjo, Lrg Suka Damai I Kelurahan, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang.

Fatoni mengatakan peninjauannya kali ini bertujuan guna memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Palembang berjalan lancar, aman dan damai.

“Hari ini saya bersama Forkopimda lengkap, Ketua KPU, Ketua Bawaslu meninjau TPS-TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, ini kita lakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah, TNI, Polri ini kompak dan memastikan pemilu aman,” kata Fatoni.

Tak hanya itu, Fatoni mengatakan kehadirannya beserta jajaran Forkopimda memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat Sumsel menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya.

“Selain itu, peninjauan ini kita lakukan untuk memberikan motivasi masyarakat agar berbondong-bondong datang untuk memilih, kita harus gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya karena ini hanya lima tahun sekali maka itu gunakanlah hak suara kita dengan baik,” kata Fatoni.

Kemudian, Fatoni juga mengapresiasi masyarakat yang telah menjaga iklim kondusif sehingga pada pelaksanaan hari pemilihan berjalan dengan lancar dan tertib.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat Sumsel yang menjaga iklim kondusif selama ini. Kita bisa semuanya menjalankam kegiatan dengan baik tanpa kendala ini perlu harus kita jaga sampai seterusnya,” ujarnya.

Fatoni berharap pelaksanaan Pemilu di Sumsel kali ini menjadi percontohan bagi



daerah-daerah lainnya.

“Harapan kita bersama, pemerintah dan masyarakat melihat pelaksanaan pemilu di Sumsel aman, lancar dan sukses dan Sumsel menjadi percontohan bagi daerah lainnya karena ini tekad kita semua,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini turut hadir mendampingi, di antaranya Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil, Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo, Kajati Sumsel Yulianto, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Palembang, Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan, Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang Kolonel Pnb Rizaldy Efranza, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya,

Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan.

Usai melakukan pemantauan ke sejumlah titik TPS di Kota Palembang, Agus Fatoni didampingi Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tyas Fatoni menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mereka menggunakan hak pilihnya di TPS 35 yang berlokasi di Jl. Lingkar Istana RT 52, RW 11 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang.

Sekitar pukul 11.30 WIB Fatoni dan Istri Tyas Fatoni menggunakan hak pilihnya dengan Form A Pindah Memilih. Hal ini berarti keduanya hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

“Alhamdulillah baru saja saya beserta istri

telah menggunakan hak suara, melakukan pemilihan umum mencoblos surat suara di TPS 035 di Kota Palembang Sumsel,” kata Fatoni.

Fatoni menilai pelaksanaan pemilu di Palembang berjalan dengan kondusif, lancar dan aman. Selain itu, masyarakat juga terlihat sangat antusias menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Suasana disini cukup kondusif semua masyarakat datang berbondong-bondong, semuanya antusias dan Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, aman dan tertib. Ini juga terjadi di TPS-TPS yang kami pantau bersama Forkopimda,” ujarnya.

“Akan berlangsung penghitungan suara, kita ikut awasi bersama-sama,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini juga, Fatoni tak hentinya mengingatkan masyarakat menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ini bertujuan guna mewujudkan pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“Saya mengimbau masyarakat yang masih berada di rumah untuk segera datang berbondong-bondong ke TPS gunakan hak pilihnya, lima tahun ini sekali kita gunakan sebaik-baiknya karena ini juga sebagai penentuan kemajuan bangsa,” kata Fatoni

Terakhir, Fatoni berpesan kepada seluruh warga Sumsel untuk terus menjaga iklim kondusif dan menghindari konflik.

“Kemudian yang terpenting jaga iklim kondusif, pertahankan zero konflik daerah kita ini harus kita rawat bersama-sama,” imbuhnya.

“Untuk seluruh petugas KPPS dan saksi jalankan tugas dengan sebaik-baiknya kita kawal pemilu ini aman,” pungkasnya. ●IRY





“Kami sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Lapas Kayu Agung”

Bambang Haryanto

ANTUSIASME PEMILIH DI OKI RELATIF TINGGI

Penjabat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Asmar Wijaya berkeliling sambangi sejumlah TPS pada hari pemungutan suara (Pemilu) 2024 di Kabupaten OKI, pada Rabu 14 Februari 2024.

Asmar Wijaya ikut didampingi Forkopimda OKI, Dandim 0402 OKI, Kapolres, Kajari, Plh Sekda, KPU dan Bawaslu.

Mengawali, Asmar Wijaya mendatangi TPS di Kelurahan Tanjung Lubuk Kecamatan Tanjung dilanjutkan TPS di Desa Serapek Kecamatan Teluk Gelam dan beberapa TPS di Kecamatan Pedamaran.

Bersama Forkopimda Pj Bupati juga sempat menyapa para pemilih dan Petugas KPPS di TPS.

Asmar mengatakan, animo masyarakat



dan rahasia,” katanya.

Setelah menyalurkan hak suaranya, Asmar Wijaya menyampaikan harapannya agar pelaksanaan pemilu dan proses pencoblosan sampai perhitungan suara berjalan dengan lancar.

“Diharapkan pelaksanaan pemilu di kabupaten OKI dapat berjalan dengan lancar, tetap kondusif dan jangan sampai

cermat dan teratur.

Kepala Lapas Kayu Agung, Jepri Ginting, mengatakan bahwa partisipasi warga binaan dalam Pemilu ini sangatlah penting untuk menegaskan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara tetap dihormati meskipun sedang menjalani masa hukuman.

“Kami memberikan akses yang sama

yang pentingnya menghormati hak asasi setiap warga binaan.

Kondisi kondusif yang tercipta di dalam lapas ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam situasi terbatas, semangat demokrasi tetap berkobar di hati setiap individu.

Sebelum hari pencoblosan, Asmar Wijaya sudah memastikan logistik Pemilu 2024 yang terdiri dari kotak suara, bilik suara, surat suara, dan lainnya, terdistribusi dengan baik di seluruh desa di 18 Kecamatan se Kabupaten OKI termasuk wilayah perairan.

Asmar bersama Forkopimda, OPD terkait dan camat melakukan pemantauan distribusi logistik di Kecamatan Sungai Menang dan Cengal.

Dengan mengendarai motor trail Asmar melakukan pengecekan jalur logistik di Kecamatan Sungai Menang.

“Kalau wilayah perairan distribusi lancar karena sudah kita antisipasi sejak awal. Hari ini kita pantau jalur pedesaan yang tergenang air akibat curah hujan yang tinggi,” ujar Asmar

Setelah melakukan pengecekan Asmar



OKI pada Pemilu 2024 di Kabupaten OKI relatif tinggi. Hal ini ditandai dengan tingkat partisipasi kehadiran masyarakat pada masing-masing TPS.

“Alhamdulillah, kami melihat antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya relatif tinggi. Masyarakat juga terlihat gembira saat melakukan pencoblosan, Insya Allah semoga pesta demokrasi tahun ini dapat berjalan aman, damai, dan kondusif sampai akhir kegiatan,” tambahnya.

Tepat pukul 12.30 WIB, sebagaimana terdata masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Pj Bupati Asmar beserta keluarga menyalurkan hak suaranya.

“Saya bersama istri dan anak menyalurkan suara, karena sebagai warga negara kita semua memiliki hak memilih bebas

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” bebarnya.

Sementara, ratusan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIB Kayu Agung, Sumsel antusias menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Suasana di TPS khusus yang disediakan di dalam lapas terlihat tenang dan tertib. Para warga binaan tampak antusias mengikuti proses pemungutan suara, dengan beberapa di antaranya memberikan kesaksian bahwa mereka sangat menghargai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi negara.

Petugas lapas bersama dengan berbagai pihak terkait telah bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan tanpa kendala. Mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan pemungutan suara, setiap tahapan dijalankan dengan



kepada seluruh warga binaan untuk menggunakan hak pilih mereka. Ini adalah bagian dari upaya rehabilitasi yang kami lakukan di lapas ini,” ujarnya.

Kepala Divisi Pemasarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Sumsel, Bambang Haryanto, yang meninjau langsung jalannya pemungutan suara di Lapas Kayu Agung, menggambarkan proses pemilu di dalam lembaga pemasarakatan tersebut sebagai salah satu langkah konkret dalam mendorong partisipasi demokratis warga binaan.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Lapas Kayu Agung. Ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memastikan hak politik setiap warga binaan dijalankan secara adil dan transparan,” ujar Bambang.

Pada akhirnya, pelaksanaan Pemilu di Lapas Kayu Agung menjadi contoh ten-

memastikan distribusi logistik pemilu di wilayah ini tidak terganggu karena akan ada penanganan darurat dari Dinas PUPR OKI dibantu perusahaan setempat

“Tadi ada jalan yang tergenang air tapi masih bisa dilewati untuk jalan yang mengalami kerusakan akan ada penanganan darurat dari Dinas PUPR dibantu perusahaan terdekat,” ujar Asmar.

Camat Sungai Menang, Eka Mardiah mengatakan beberapa Akses Jalan di Wilayahnya mengalami kerusakan antara lain Ruas Jalan Talang Jaya -Dusun Bebah Permata- Dusun Krikil dan Dusun Kemang.

“Tidak mengganggu distribusi logistik karena masih bisa dilewati dan ada penanganan darurat,” jelasnya

Pengiriman logistik Pemilu 2024 ke wilayah perairan dilakukan lebih awal dengan menggunakan speedboat dan dikawal ketat aparat kepolisian. ●IRY

“Jadi visi misi saya untuk menjembatani dunia kesehatan dengan masyarakat secara umum, sehingga mencapai secara langsung lebih luas cakupannya berjuang ke DPD RI”

Ratu Tenny Leriva



CALEG DPD DARI SUMSEL DIKUASAI TIGA WANITA

Berdasarkan hitung suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis 15 Februari 2024 DPD RI wilayah Sumatera Selatan (Sumsel), tiga sosok wanita ini berhasil mendulang suara terbanyak.

Ketiga wanita tersebut adalah Ratu Tenny Leriva, Jialyka Maharani dan Amaliah Sobli.

Ratu Tenny Leriva sendiri berhasil mengumpulkan 87.491 suara, Jialyka Maharani 54.324 suara sedangkan Amaliah berhasil mengumpulkan 48.341.

Ratu Tenny Leriva unggul pada pemilihan di tiga Kabupaten / Kota yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dengan perolehan suara mencapai 34.309, Kota Palembang dengan jumlah 13.844 suara serta di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan jumlah 7.345 suara.

Sedangkan pada posisi kedua adalah Jialyka Maharani unggul pada pemilihan di tiga Kabupaten / Kota yakni Kota Palembang dengan perolehan suara mencapai 10.597, Kabupaten Banyuasin mencapai 7.904 suara serta di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dengan 7.285 suara.

Pada posisi ketiga adalah Amaliah unggul pada pemilihan di tiga Kabupaten / Kota yakni Kota Palembang mencapai 15.149 suara, Kabupaten Ogan Ilir 5.822 suara dan Kabupaten Banyuasin mencapai 5.120 suara.

Bila hasil perhitungan sementara KPU ini bertahan hingga perhitungan rampung 100 pers-

en, artinya Ratu Tenny Leriva yang merupakan putri bungsu Mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru ini akan mengikuti jejak almarhumah kakaknya Percha Leanpuri.

Jejak politik pertama kali almarhumah Percha Leanpuri yakni terpilih menjadi anggota DPD RI periode 2009-2014.

Percha menjadi anggota DPD termuda kala itu. Saat itu usia Percha 23 tahun.

Nah, bila Ratu Tenny Leriva ini terpilih di Pemilu 2024, usianya diperkirakan akan sama dengan usia Percha Leanpuri kala terpilih jadi anggota DPD RI.

Sebelumnya Ratu menjelaskan, alasan dirinya lebih memilih DPD RI daripada DPR RI karena mempunyai kewenangan yang lebih besar. Sebab, sambungnya, DPD RI mempunyai segmen sendiri.

“Kalau DPD RI memiliki segmen sedangkan saya memiliki latar belakang kesehatan, jadi visi misi saya untuk menjembatani dunia kesehatan dengan masyarakat secara umum, sehingga mencapai secara langsung lebih luas cakupannya berjuang ke DPD RI,” jelasnya.

Ratu berharap, jika nanti dirinya duduk sebagai senator, maka akan mudah menjadi jembatan suara nakes dengan masyarakat. Sehingga ke depan aspirasi tersampaikan dengan baik dan juga termasuk

masyarakat dapat hak terbaik.

“Termasuk dengan saya duta literasi ingin memajukan pendidikan di Sumsel, pastinya kalau memenuhi syarat ingin menanglah, sedangkan basis tersebar merata dengan berjuang karena memilih ada segmen seluruhnya dan karena kita milenial lebih mengajak pemuda pemudi,” jelasnya.

Ratu Tenny Leriva sebelumnya menjadi sorotan karena memutuskan maju mencalonkan diri DPD RI pada Pemilu 2024, pada usia masih 23 tahun.

Ratu merupakan anak bungsu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kelahiran Palembang pada 10 Juni 2000.

Meski usianya masih muda, Ratu Tenny Leriva dikenal sudah punya banyak prestasi. Selain lulusan kedokteran, Ratu Tenny Leriva juga memiliki hobi yang memacu adrenalin.

Ratu Tenny Leriva ternyata sangat menyukai olahraga berkuda dan seni.

Tak hanya itu, Ratu Tenny Leriva yang dinobatkan sebagai Duta Anti Narkoba ini juga berperan aktif dalam dunia pendidikan.

Anak ke-empat Herman Deru ini bahkan memiliki sekolah kejurusan yang didedikasikan untuk anak-anak di daerah.

Selain mendedikasikan diri di dunia pendidikan, Ratu Tenny Leriva juga memiliki

sederet bisnis yang dikelolanya.

Gadis berusia 23 tahun ini diketahui memiliki bisnis 3D Stable Palembang dan 3D Carwash Palembang.

Sementara, pengamat politik Ade Indra Chaniago menegaskan bahwa dinasti politik bukanlah sesuatu yang baru di berbagai negara. Ade Indra menyatakan bahwa fenomena ini timbul karena kecenderungan manusiawi yang enggan melepaskan kekuasaan dengan mudah.

“Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hal ini terjadi. Menurut saya, hal ini wajar karena alamiah manusia yang cenderung enggan melepaskan kekuasaan ketika sudah merasakan nikmatnya. Fenomena ini juga tercermin dalam wilayah kekuasaan politik.”

Lebih lanjut, Ade Indra mencatat bahwa keluarga politik seringkali memanfaatkan situasi ini, terutama petahana atau incumbent yang memiliki akses yang kuat terhadap berbagai sumber daya politik seperti logistik, birokrasi, dan jaringan.

“Petahana atau incumbent seringkali memiliki jaringan penyelenggara yang kuat serta akses ke sumber-sumber ekonomi yang sangat penting dalam kontestasi politik. Tindakan yang diambil oleh petahana atau incumbent ini merupakan strategi dalam upaya mempertahankan kekuasaan politiknya,” tambahnya.

Dia juga mengevaluasi peluang para calon dari keluarga Herman Deru dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Meskipun tampaknya mereka memiliki posisi yang kokoh, Ade Indra menyoroti bahwa masa depan politik Sumsel juga akan dipengaruhi oleh siapa yang menggantikan Gubernur Herman Deru setelah masa jabatannya berakhir.

“Meskipun tampaknya keluarga tersebut memiliki pengaruh yang kuat, namun kita perlu memperhatikan siapa yang akan menggantikan Gubernur Herman Deru setelah masa jabatannya berakhir. Hal ini akan menjadi penentu bagi arah politik keluarga tersebut dalam kontestasi,” jelasnya. ●IRY





“Mereka memiliki pedoman pengguna (user guideline) mereka sendiri, di mana konten yang melanggar akan dihapus atau diberikan peringatan”

Samuel Abrijani

INFO

EKSEKUTIF

21

Minggu II • Februari 2024

KOMINFO HAPUS 103 RIBU KONTEN HOAKS PEMILU 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengungkapkan komitmennya dalam menangkal penyebaran informasi palsu (hoaks) yang terkait dengan Pemilihan Umum 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan telah melakukan penghapusan konten yang tidak benar terkait dengan informasi Pemilu 2024.

“Dengan tegas, kami telah melakukan penghapusan konten yang tidak benar. Kami melakukan patroli siber selama 24 jam,” ungkap Budi.

Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo, jumlah hoaks Pemilu 2024 mencapai 227 periode 2023 hingga Januari 2024. Angka ini jauh lebih rendah ketimbang hoaks Pemilu 2019.

Dari data yang sama, jumlah hoaks Pemilu 2019 yang ditemukan Kominfo mencapai 714. Rincinya, tahun 2018 ditemukan 58 hoaks, sedangkan 2019 ada 656 hoaks.

Rincian hoaks Pemilu 2024 yang ditemukan Kominfo meliputi berita dukungan tokoh, instansi, kementerian/lembaga, dan organisasi masyarakat ke pasangan bakal calon presiden (bacapres). Hoaks dukungan pejabat negara kepada pasangan bacapres, manipulasi gambar atau foto dukungan ke bacapres. Pernyataan tokoh dan paslon bacapres terkait agama atau SARA

Lalu, penyelenggaraan Pemilu, pernyataan tidak benar terkait instansi penyelenggara, penambahan periode jabatan presiden. Deklarasi dukungan untuk bacapres, hoaks kandidat pasangan bacapres, pembatalan bacapres.

Bansos saat kampanye pilpres, dukungan aparat penegak hukum dan kejadian pada debat capres atau cawapres.

Kominfo mencatat bahwa hingga bulan Januari 2024, telah tercatat sebanyak 103.000 konten hoaks terkait dengan pemilu. Dalam rangka meminimalisasi dampak dari penyebaran hoaks ini, pemahaman

mengenai literasi digital dianggap sangat penting.

“Maraknya berita hoaks saat ini dapat dipahami karena Indonesia sedang mengalami periode pesta demokrasi lima tahunan,” sambungnya.

Oleh karena itu, isu pemilu menjadi dominan dalam pembicaraan di media sosial sebagai platform interaktif bagi warganet untuk mendapatkan informasi dan berdiskusi mengenai politik saat ini. Dinamika politik yang terus berkembang merupakan tantangan tersendiri.

Media sosial telah menjadi kanal utama untuk menyampaikan aspirasi, dan diharapkan masyarakat dapat memperlihatkan sikap bijak dalam menghadapi polemik yang mungkin timbul.

Menurut catatan Kominfo, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penyebaran hoaks menjelang pemilu hingga awal Januari 2024, dengan total 103.000 konten hoaks, yang mayoritas tersebar di platform milik Meta.

Fenomena percakapan terkait Pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada 2019 juga menjadi sorotan. Tahun 2024 menjadi tahun yang penting karena bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi 50 negara lain di seluruh dunia yang menyelenggarakan pemilu.

Dalam konteks ini, penggiat Literasi Digital dan Dewan Pengarah Siberkreasi, N d o r o K a k u n g, menyebutkan bahwa pesta demokrasi di Indonesia akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Lebih dari 200 juta orang di Indonesia dan 1,75 juta pemilih

di luar negeri akan menggunakan hak pilih mereka untuk memilih Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

“Pemilu kali ini juga didominasi oleh pemilih muda, dengan rentang usia 22-32 tahun, yang mencapai 56% dari total pemilih, dengan 11 juta di antaranya adalah pemilih pemula. Kelompok demografi ini juga merupakan pengguna media sosial yang paling aktif, sehingga menjadi target audiens utama bagi para kandidat,” katanya.

Sementara, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani menyatakan, bahwa platform-platform digital memiliki program khusus untuk mengawasi konten-konten terkait Pemilu 2024.

Menurutnya, para penyedia platform ini memiliki kepentingan yang sejalan, yaitu meningkatkan nilai demokrasi di Indonesia.

“Mereka memiliki pedoman pengguna (user guideline) mereka sendiri, di mana konten yang melanggar akan dihapus atau diberikan peringatan. Mereka sudah memiliki dua sistem untuk hal ini,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika serta platform-platform digital tersebut memiliki sistem yang saling terhubung untuk berkomunikasi jika ada kebutuhan untuk menghapus konten yang melanggar.

“Mengajukan permintaan untuk menghapus konten tersebut tidaklah mudah. Kita harus menjelaskan permasalahan yang terkait dengan konten tersebut, serta undang-undang apa yang dilanggar oleh konten tersebut, agar mereka bersedia untuk menghapusnya,” jelas Samuel.

Semuel, yang akrab disapa Semmy, menegaskan bahwa proses penghapusan konten tidak dilakukan langsung oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, melainkan oleh platform tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika serta platform-platform digital telah terjalin cukup lama. Mereka memiliki sistem yang memungkinkan proses ini dilakukan secara otomatis, tanpa lagi memerlukan campur tangan manual.

“Kami memiliki mekanisme untuk berkomunikasi langsung dengan mereka, atau ada sistem yang terhubung dengan sistem mereka sehingga prosesnya sudah berjalan otomatis, seperti ‘ada konten, tolong diulas,’ ungkapnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta penegak hukum, khususnya dalam hal cybercrime, untuk memastikan bahwa ruang digital bersih dari konten-konten yang merugikan seperti ujaran kebencian.

“Kami tidak akan mentolerir konten yang dapat memicu konflik di masyarakat,” tandasnya. ●IRY





REKOMENDASIKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sebanyak 2.413 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang (PSU) lantaran para pemilih mendapatkan hak pilihnya lebih dari satu kali.

“Ini kemungkinan PSU-nya besar,” ujar Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024.

Kendati demikian, Bawaslu masih mendalami hal tersebut. Dia mengatakan apakah hal itu benar merupakan rekomendasi dari panwascam dan bawaslu kabupaten/kota atau tidak.

“Tentu lagi ditelusuri apakah benar demikian (ada potensi PSU) dari panwascam dan juga bawaslu kabupaten/kota,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu juga merekomendasikan adanya pemungutan dan pencoblosan ulang pada masing-masing TPS yang terdampak bencana banjir. Rekomendasi itu diberikan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan surat suara pemilu.

“Biasanya akan ada pemungutan susulan, ini sebagai langkah antisipasi,” katanya.

Menurut dia, bencana banjir merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi. Meski demikian Bawaslu dan KPU sudah melakukan pemetaan dari indeks kerawanan pemilu.

“Untuk pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama,” ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah mendapat informasi rekomendasi dari Bawaslu Kota

Tangerang Selatan ada beberapa TPS yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara susulan. Seperti terjadi di TPS yang ada di kawasan Puri Bintaro Indah karena memang sempat mundur lantaran banjir. Namun, beranjak siang genangan surut.

Di sisi lain, Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

“Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara,” kata Bagja.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menjelaskan, 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 TPS mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

Lalu, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili

kecamatan dalam KTP elektronik. Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS,” ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

“Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 WIB,” ujarnya.

Ketiga, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C. Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.

“Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara,” kata Lolly.

Lolly menambahkan, Bawaslu mencatat pelanggaran etik dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendominasi dari 1.200 kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024.

“Pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara yang banyak dilaporkan dan ditemukan serta netralitas ASN di berbagai wilayah di Indonesia. Netralitas ASN terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena inisiatif sendiri atau bahkan terkondisikan,” katanya.

“Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara,” tutur Lolly.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman DPT tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

“Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah),” paparnya.

Kesepuluh, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS,” ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

“Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 WIB,” ujarnya.

Ketiga, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C. Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas.

“Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara,” kata Lolly.

Lolly menambahkan, Bawaslu mencatat pelanggaran etik dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) mendominasi dari 1.200 kasus pelanggaran selama tahapan Pemilu 2024.

“Pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara yang banyak dilaporkan dan ditemukan serta netralitas ASN di berbagai wilayah di Indonesia. Netralitas ASN terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena inisiatif sendiri atau bahkan terkondisikan,” katanya.

Sepanjang tahapan Pemilu 2024, pihaknya berkewajiban melakukan pengawasan dan selalu melakukan upaya pencegahan terhadap peserta pemilu, par-

tai politik, ASN dan masyarakat umum, agar tidak menjadi temuan dengan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Lolly berharap pemilu dapat berjalan dengan aman, nyaman, jujur dan adil tanpa ada pelanggaran yang dilakukan berbagai kalangan termasuk penyelenggara. “Kami akan terus meningkatkan pengawasan sampai Pemilu 2024 dinyatakan selesai,” katanya.

Dia menuturkan, masyarakat dapat membantu pihaknya dalam melapor jika menemukan pelanggaran netralitas atau pelanggaran yang dilakukan penyelenggara.

“Kita lakukan pencegahan dan memastikan apakah sebuah perkara terjadi pelanggaran atau tidak sekaligus penindakannya,” kata Lolly.

Bawaslu menemukan enam permasalahan menjelang pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan hasil patroli pengawasan se-Indonesia secara serentak. Lolly mengatakan temuan tersebut merupakan hasil patroli pengawasan terhadap data dari 343.307 tempat pemungutan suara (TPS) di 27 provinsi, yang masuk ke aplikasi Siwaslu per 14 Februari 2024, pukul 00.01 WIB.

Lolly mengatakan data tersebut belum melingkupi wilayah Maluku, Papua, serta wilayah dengan kendala jaringan internet, karena keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data; sehingga datanya berpotensi bertambah.

“Pertama, terdapat pemilih di 18.689 TPS yang belum menerima Formulir Model C Pemberitahuan KPU. Provinsi dengan kejadian terbanyak, yakni di atas 1.000 TPS, terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Lolly.

Kedua, terdapat 3.100 TPS yang belum disiapkan hingga H-1 pencoblosan atau pada Selasa, 13 Februari 2024, pukul 21.00 WIB.

Provinsi dengan kejadian tersebut terbanyak, yakni di atas 100 TPS, terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten, Sumatera Selatan, dan Riau.

Ketiga, terdapat 3.597 TPS berada di tempat yang sulit dijangkau atau diakses oleh penyandang disabilitas pengguna kursi roda dan lanjut usia. Misalnya, tempat TPS berbatu, berundak tanahnya, berumput tebal, berpasir, bertangga, dan/atau melompati parit

Keempat, terdapat 8.061 KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada Selasa, 13 Februari 2024.

Kelima, terdapat 4.594 TPS yang kekurangan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada Selasa, 13 Februari 2024. Keenam, terdapat 3.441 TPS yang kotak suara TPS-nya diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel.

Lolly mengatakan kotak suara yang tidak tersegel itu di antaranya karena rusak saat distribusi logistik ke KPPS, sehingga segelnya terlepas. ●RDO





“Yang publik harus tahu adalah Sirekap itu hanya alat bantu, ya. Yang nanti menjadi yang utama dalam proses rekapitulasi kita adalah rekapitulasi manual berjenjang. Nah kita akan lihat proses ini sampai tanggal 20 Maret”

Lolly Suhenty

SIREKAP SALAH INPUT KPU KENA SEMPROT

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan ada sebanyak 2.325 tempat pemungutan suara (TPS) yang mengalami salah konversi Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

Kendati demikian, KPU belum mengecek secara detail terkait jumlah suara yang tidak tepat. Sebab, kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano yang diunggah bersifat acak.

Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang salah di 2.325 TPS sudah teridentifikasi oleh sistem. KPU juga sudah meminta agar petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan koreksi terhadap konversi yang salah.

“Supaya pemindaian itu jelas dan terbaca sebagaimana tertulis di dalam formulir,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, Kamis 15 Februari 2024.

Hasyim menjelaskan, Formulir Model C1-Plano diunggah oleh petugas KPPS menggunakan fitur foto dalam aplikasi Sirekap. Kemudian, terdapat sistem konversi dalam Sirekap yang berfungsi membaca formulir tersebut.

Lalu, secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Di situlah, muncul masalah perbedaan angka antara Formulir Model C1-Plano dan Sirekap.

Hasyim mengatakan, KPU segera mengoreksi salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano pada Sirekap.

“Kami di KPU pusat melalui sistem yang ada, itu termonitor mana saja antara unggahan formulir C hasilnya dengan konversinya salah, itu termonitor,” kata Hasyim.

Menurutnya, KPU telah memonitor jika terdapat kesalahan hitung. Oleh karena itu, KPU akan segera melakukan koreksi terkait kesalahan konversi tersebut.

“Kami sebenarnya mengetahui dan tentu saja untuk yang penghitungan atau konversi dari yang formulir ke angka-angka penghitungan akan kami koreksi sesegera mungkin,” jelasnya.

Terkait hal tersebut, Hasyim menegaskan tak ada niat untuk memanipulasi Formulir Model C1-Plano pada Sirekap.

“Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah hasil suara karena pada dasarnya Formulir C1 Hasil Plano diunggah apa adanya,” ujar Hasyim.

Dijelaskan pula bahwa Formulir Model C1-Plano yang diunggah oleh petugas KPPS dapat dimonitor dan disaksikan bersama-sama.

Hasyim menegaskan bahwa KPU akan terus mengunggah Formulir Model C1-Plano agar masyarakat terus mengetahui sampai batas akhir. “Hanya saja untuk konversi yang kebetulan sistem membacanya kurang akurat atau kurang tepat nanti akan dilakukan koreksi supaya sesuai dengan apa yang formulir yang diunggah,” katanya.

Hasyim juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano. “Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah,” ujarnya.

Ia pun memastikan bahwa salah konversi itu akan segera dikoreksi.

Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Sekali lagi siapapun teman-teman jurnalis, pemilih, masyarakat luas bisa komplain soal ini, karena apa? Sekali lagi karena bisa membaca Sirekap, mengakses Sirekap, kalau tidak ada Sirekap tidak mungkin bisa tahu publikasi formulir di tingkat TPS tersebut,” jelasnya.

Hasyim juga mengaku bersyukur Sirekap membuat penghitungan suara di TPS diketahui masyarakat luas. Menurutnya, keberadaan Sirekap membuat data penghitungan suara lebih transparan. Data yang dipublikasikan dalam Sirekap pun apa adanya, sehingga masyarakat dapat memonitor jika terdapat kesalahan.

“Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tapi semuanya kita publikasikan apa adanya,” katanya.

Hasyim mengatakan bila Sirekap tidak bekerja, tidak mungkin masyarakat bisa tahu ada kesalahan data dan melaporkannya. Inilah keuntungan adanya Sirekap pada Pemilu 2024. Selain itu, salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Formulir D itu, kata Hasyim, akan diunggah dalam Sirekap, sehingga masyarakat dapat mengeceknya kembali apakah sudah ada kesamaan antara

hasil perolehan suara di TPS dan hasil di Sirekap.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta KPU untuk segera memperbaiki Sirekap supaya tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan terkait kesalahan input data hasil penghitungan suara. “Kami cek, ternyata memang ada kesalahan input ini,” ujar dia.

Bawaslu menduga, kesalahan input tersebut terjadi karena ada ketidakakuratan sistem digital pada Sirekap dalam membaca tulisan pada formulir hasil penghitungan suara yang difoto oleh petugas di TPS.

“Bisa jadi yang namanya garis tangan tidak sesuai, sehingga kemampuan membacanya yang kemudian tidak akurat,” imbuhnya.

Menurut Lolly, data yang tidak terbaca dengan akurat oleh Sirekap seharusnya langsung bisa dikoreksi pada tingkatan bawah agar tidak menciptakan kebingungan.

“Misalnya, di TPS tertentu sudah langsung teridentifikasi, ‘Oh salah, nih. Yang tadinya 10, karena tarikannya (tulisan tangan) tidak pas, menjadi 100, misalnya. Harusnya kan terkoreksi cepat,” tutur Lolly.

“Tapi sistem yang ada di Sirekap itu enggak seperti itu, akhirnya menimbulkan ketidakpastian. Nah, teman-teman KPPS pun tidak punya kemampuan mengoreksi, itu yang kemudian jadi problem kan,” sambung dia.

Terlepas dari itu, Lolly meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi manual berjenjang untuk mengetahui hasil akhir penghitungan suara Pemilu 2024.

“Yang publik harus tahu adalah Sirekap itu hanya alat bantu, ya. Yang nanti menjadi yang utama dalam proses rekapitulasi kita adalah rekapitulasi manual berjenjang. Nah kita akan lihat proses ini sampai tanggal 20 Maret,” ujarnya.

Lolly menambahkan, Bawaslu juga memiliki Siwaslu yang berupaya untuk memastikan akurasi data di TPS dengan menyimpan bukti autentik hasil penghitungan suara.

“Nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan persidangan yang membutuhkan ‘autentikasi’ data, akurasi data, tentu kalau buka kotak suara itu kan susahnya minta ampun, ya, tapi ketika kita punya Siwaslu yang dipotret langsung dari TPS itu mudah-mudahan bisa membuat terang sebuah peristiwa,” ujarnya. ●RDO





PRABOWO-GIBRAN MENANG HITUNG CEPAT

Sejumlah lembaga survei mulai merilis hasil hitung cepat atau quick count pada Pilpres 2024. Berdasarkan hasil sementara, suara pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul jauh dibanding pasangan lain.

Hampir semua lembaga survei yang menyelenggarakan hitung cepat menyatakan Prabowo-Gibran meraih suara di kisaran 50-60 persen. Sementara itu, pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan rentang suara 24-26 persen. Di urutan ketiga ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang meraih suara di rentang 16-18 persen.

Meski sudah mengantongi suara di atas 50 persen, peluang Prabowo-Gibran melenggang menjadi pemenang pemilihan presiden belum seratus persen. Selain karena masih harus menunggu hasil suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan ini juga harus memenuhi sejumlah syarat.

Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A disebutkan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemenang pemilu. Pasal 6A menyebutkan bila pilpres diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon, maka pemenang ditentukan oleh perolehan minimal 50 persen suara, sebaran suara

sedikitnya 20 persen di setiap provinsi, dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia (20 provinsi). Tapi, bila diikuti dua paslon, syaratnya hanya memperoleh 50 persen suara plus 1.

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden,” bunyi Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Syarat yang sama juga tertuang dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 416 Ayat (1). Merujuk ketentuan ini karena saat ini jumlah provinsi adalah 38, maka pemenang pilpres harus menguasai suara di 20 provinsi.

“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia,” bunyi Pasal 416 ayat 1 UU 7/2017.

Tidak Mengejutkan
Direktur Algoritma
Research and Con-

sulting, Aditya Perdana, mengatakan, potensi kemenangan Prabowo-Gibran seperti yang terlihat dari hasil quick count sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan.

Dia menyebut peluang itu sudah tercermin dari sejumlah hasil survei yang sebelumnya telah dirilis berbagai lembaga menjelang sebelum pemungutan suara.

Aditya mengatakan hasil pemilihan presiden hari ini merupakan cerminan dari masih besarnya penerimaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Meski tidak menyampaikan secara resmi, Jokowi dalam berbagai kesempatan menunjukkan dukungan kepada Prabowo-Gibran yang disebut sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melanjutkan program pemerintah saat ini.

Sumbangan suara dari pendukung Jokowi pada Prabowo-Gibran, menurut Aditya, tercermin dari hasil suara partai menurut quick count. Saat ini, suara partai pendukung utama seperti Gerindra tidak terlalu dominan menopang suara. Di sisi lain pada pemilu 2019, basis suara Prabowo juga lebih rendah dari hasil quick count pemilu 2024. Ditambah lagi basis pendukung Prabowo di 2019 sudah terbelah pada pemilu 2024.

“Itu membuktikan dampak Jokowi Effect masih sangat mempengaruhi elektoral calon presiden,” ujar Aditya, Rabu, 14 Februari 2024.

Direktur Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, juga menjelaskan hal sama. Menurut Hanta, efek Jokowi sangat terlihat dari kemenangan Prabowo-Gibran di sejumlah daerah, seperti Jawa Tengah dan Bali.

Merujuk data hitung cepat Poltracking, pasangan Prabowo-Gibran meraih suara 53 persen di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang dikuasai oleh PDIP. Pada 2019, Jawa Tengah merupakan basis suara PDIP dan Jokowi.

“Eksodus pemilih Ganjar ke

Litbang Kompas

Anies-Muhaimin	25,10 persen
Prabowo-Gibran	58,73 persen
Ganjar-Mahfud	16,17 persen

Politika Research and Consulting (PRC)

Anies-Muhaimin	24,08 persen
Prabowo-Gibran	59,35 persen
Ganjar-Mahfud	16,58 persen

Poltracking Indonesia

Anies-Muhaimin	24,38 persen
Prabowo-Gibran	59,33 persen
Ganjar-Mahfud	16,29 persen

Charta Politika Indonesia

Anies-Muhaimin	25,70 persen
Prabowo-Gibran	57,79 persen
Ganjar-Mahfud	16,50 persen

Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Anies-Muhaimin	25,25 persen
Prabowo-Gibran	57,50 persen
Ganjar-Mahfud	17,26 persen

Voxpol Center Research & Consulting

Anies-Muhaimin	26,11 persen
Prabowo-Gibran	57,55 persen
Ganjar-Mahfud	16,35 persen

Data hitung cepat Pileg 2024 berdasarkan

Indikator Politik Indonesia:

PKB	: 10,63 persen
Partai Gerindra	: 13,65 persen
PDIP	: 16,68 persen
Partai Golkar	: 14,75 persen
Partai NasDem	: 9,40 persen
Partai Buruh	: 0,73 persen
Partai Gelora	: 0,93 persen
PKS	: 8,17 persen
PKN	: 0,32 persen
Partai Hanura	: 0,84 persen
Partai Garuda	: 0,38 persen
PAN	: 6,97 persen
PBB	: 0,48 persen
Partai Demokrat	: 7,53 persen
PSI	: 2,87 persen
Partai Perindo	: 1,42 persen
PPP	: 3,66 persen
Partai Ummat	: 0,59 persen

Prabowo betul-betul masif di Jawa Tengah dan itu faktor Pak Jokowi,” ujar Hanta.

Selain itu, menurut Hanta, menjelang pencoblosan migrasi masyarakat yang puas kepada Jokowi dari semua mendukung Ganjar menjadi mendukung Prabowo juga semakin jelas. Hasil hitung cepat menurut dia juga mengkonfirmasi kepuasan publik pada Jokowi masih tinggi.

Di sisi lain, Aditya mengatakan hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan adanya upaya keras dari PDIP untuk memastikan kemenangan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu menurut dia menjaga kantong suara dengan relatif baik.

Namun untuk urusan pilpres, PDIP dinilai kesulitan dalam menghadapi dominasi pendukung Jokowi. Pemilu 2024 menurut dia juga menunjukkan pilihan partai tak sejalan dengan pilihan capres.

“Jadi ini saling mempengaruhi antara Jokowi dan PDIP,” ujar Aditya. ●RDO

